

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI DESA JATI KULON  
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Oleh:  
Muhammad Marzuki  
1501046012

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**



Lampiran : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan pernaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Marzuki  
NIM : 1501046012  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)  
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di  
Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten  
Kudus

telah kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan.  
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

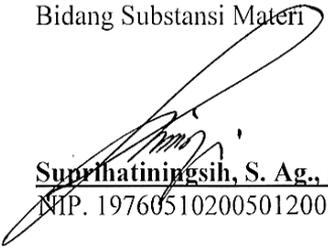
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Desember 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tatatulis

  
Suprihatiningsih, S. Ag., M. Si  
NIP. 197605102005012001

  
Sulistio, S. Ag., M. Si  
NIP. 197002021998031005



SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA JATI KULON KECAMATAN JATI  
KABUPATEN KUDUS

Disusun Oleh:  
Muhammad Marzuki  
1501046012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 20 Desember 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

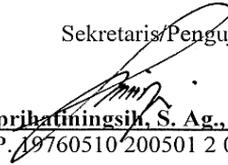
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Sulistio, S. Ag., M. Si  
NIP. 19700202 199803 1 005

Sekretaris/Penguji II



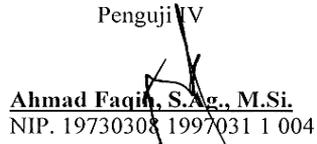
Suprihatiningsih, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19760510 200501 2 001

Penguji III



Drs. Kasmuri, M. Ag.  
NIP. 19660822 199403 1 003

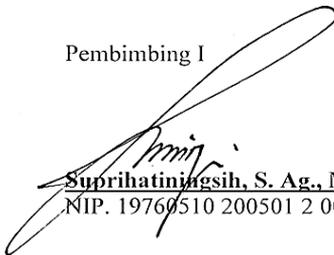
Penguji IV



Ahmad Faqih, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19730308 1997031 1 004

Mengetahui

Pembimbing I



Suprihatiningsih, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19760510 200501 2 001

Pembimbing II



Sulistio, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19700202 199803 1 005

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 20 Desember 2019



Dr. Irena Supena, M. Ag.  
NIP. 196410 200112 1 003



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Desember 2019



Muhammad Marzuki  
NIM: 1501046012



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohim,

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus”. karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana sosial (S.Sos) bidang jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang diutus untuk menyebarkan Islam di dunia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya serta menjadi umatnya kelak di yaumul akhir.

Untuk sampai pada tahapan ini, banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan. Demikian pua, telah banyak bantuan baik materii, mateiil maupun sumbagan pemikiran dan peranaan berharga dari berbagai pihak yang penulis terima. Oleh karena itu, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran illahi robbul Izazati, Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan fakultas dakah dan komunikasi UIN Walisongo semarang.

3. Sulistio, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si. selaku dosen Pembimbing I sekaligus wali dosen yang selalu sabar dan memberikan nasehat di tahun-tahun pembelajaran bagi penulis serta yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, mengarahkan dan membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini
5. Sulistio, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ide-ide terbaiknya untuk membimbing dan memberi pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan.
7. Segenap karyawan dan karyawan lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Sugeng Prasetyo selaku Kepala Desa Jati kulon Kecamatan Jati kabupaten Kudus yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan tulus membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. H. Mas'ud selaku Direktur BUMDes Sumber Pangan Sejati Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang selalu sabar mendampingi saya selama proses penelitian.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Ulil Albab Lil Banin Bapak KH. Dr Abdul Muhaya, M.Ag, Ibu Nyai Hj. Esti Puji Astuti beserta putra putrinya yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mendidik pendidik penulis.
11. Abah Ali Makmur dan Ibu Khodijah yang tak henti-hentinya mendukung dan mendo'akan putrinya.

12. Keluarga besarku, keluarga Bapak Sirin yang tak henti-hentinya memberikan do'a dandukungun sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak saya, Bapak Sirin dan juga manjedi ibu saya yang selalu mendampingi saya untuk menelasaikan penelitian ini dari proses awal sampai selesai
14. Para ustadz Ma'had Ulil Albab Lilbanin Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Temen senampan makan asrama terutama De Labib, Amir, dan adek-adekku yang setia dalam membuly penulis sehingga membuat motivasi penulis untuk segera manyalesaikan penelitiannya.
16. Kakak-kakaku tersayang dan tercinta Suparti, Nurul Hidayati, Abdul Wahid, Muhammad Nafi yang selalu mendampingi penulis dalam penelitian di lapangan dan mendoakan serta menyemangati penulis untuk mnyelesaikan penelitiannya
17. Teman-temanku kelas PMI 2015 khususnya Raveno yang selalu bertukar pendapat dalam penulisan penelitian ini.
18. Teman-temanku di Proyek MBS Properti khususnya khususnya bapak Nursidi yang menggantikan peran penulis dikala penulis menyelesaikan penelitian dan juga Saiful Anwar yang mana menemani penulis dalam penelitiannya.
19. Rekan-rekanku dan semua pihak terkait yang telah banyak membantu dan mendorong serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
20. Serta teruntuk engkau calon Mamumku dan segeralah datang yang sampai saat ini kehadirannya masih di rahasiakan oleh Allah SWT.

Harapan penulis, semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Amin.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya sederhana ini kupersembahkan kepada keluarga yang mendukung, memotivasi dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Orang tuaku Bapak Sirin dan Ibu Badriyah (Alm) yang telah memberikan cinta dan kasihnya, mendorong, membimbing, serta yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada putranya untuk setiap langkah dalam mencari ilmu
2. Keluarga Besar Bapak Sirin yang tak pernah putus dalam membimbing, memotivasi, mendorong, serta do'anya untuk selalu berjuang dan semangat dalam menjalankan kehidupan yang berliku dan menuntut ilmu. Dan
3. Teruntuk orang yang selalu bertanya “**KAPAN SKRIPSIMU SELESAI, MAU SELELAI SAMPAI BERAPA SEMESTER??**” ini sudah kujawab tanpa harus saya jabarkan kembali



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada pada diri mereka sendiri. (Q.S, 13: 11) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006: 336).*



## ABSTRAK

Muhammad Marzuki. 1501046012. Peran Badan Usaha Mikiik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten kudus.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Desa Jati kulon yang terletak disekitar kawasan industri seringkali tercemari oleh limbah dari pabrik baik kertas, kaca, plastik, karet, besi, baja, tembaga, alumunium dan sampah rumah tangga. Belum lagi pada waktu musim penghujan sering kali masyarakat desa tekena penyakit Demam Bredara (DB), karena tidak ada pengelolaan terkait limbah yang ada di desa Jati Kulon. Selain itu, desa Jati kulon juga sebagian besar merupakan daerah pertanian. Sebagi rumusan masalah untuk penelitian, bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Bagaimanakah Hasil yang dilakukan oleh BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui hasil yang dilakukan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui hasil yang dilakukan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Penelitian ini menggunakan teori peran, Pemberdayaan Masyarakat, dan BUMDes. Sumber dan jenis data yang digunakan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sumber Pangan Sejati dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaannya. BUMDes memiliki beberapa peran dalam pemberdayaan masyarakat seperti: Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Hasil yang dilakukan BUMDes, mengurai tingkat pengangguran masyarakat di desa Jati Kulon, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. sikap perilaku masyarakat yang terbentuk diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. pengurangan sampah : 8,2 % perhari. Warga desa Jati Kulon bisa menikmati keindahan-keindahan yang dimiliki desa Jati Kulon itu sendiri. Saran yang diberikan adalah membuat payung hukum, meningkatkan sumber daya finansial, sosialisasi lebih merata memahami karakteristik pesaing sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan.

**Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, BUMDe**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian .....	21

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peran .....	30
1. Konsep Peran .....	30
2. Peran Masyarakat.....	34
3. Peran Pemerintah Desa .....	36
4. Peran Pemerintah Daerah.....	37
5. Peran Pendamping .....	38
B. Pemberdayaan Masyarakat .....	41
1. Konsep Pemberdayaan.....	41
2. Prinsip Pemberdayaan .....	48
3. Tujuan Pemberdayaan.....	48
4. Pemberdayaan Sebagai Sistem Sosial.....	51
5. Pendekatan Pemberdayaan.....	53
6. Tahapan Pemberdayaan .....	58
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	61
1. Konsep BUMDes .....	61
2. Prinsip BUMDes.....	65

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.....	71
1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah .....	71

2. Kondisi Demografi.....	77
3. Keadaan Sosial Ekonomi .....	80
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
Sumber Pangan Sejati .....	82
1. Profil Badan Usaha Milik Desa Sumber Pangan Sejati.....	82
2. Visi dan Misi BUMDes Sumber Pangan Sejati .....	85
3. Sejarah BUMDes Sumber Pangan Sejati.....	87
C. Peran BUMDes Sumber Pangan Sejati	
Dalam Pembedayaan Masyarakat.....	91
D. Hasil BUMDes Sumber Pangan Sejati	
Dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	129

#### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Analisis peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati kabupaten Kudus.....	149
B. Analisis Hasil yang dilakukan oleh BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.....	167

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	187
B. Saran-saran .....	189
C. Penutup.....	191

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur organisasi desa Jati kulon.....	76
Tabel 3.2 Jumlah penduduk desa Jati Kulon menurut jenis kelamin.....	77
Tabel 3.3 Jumlah penduduk menurut usia.....	78
Tabel 3.4 Jumlah penduduk menurut kelompok kerja .....	78
Tabel 3.5 Keadan penduduk menurut agama .....	79
Tabel 3.6 Jumlah penduduk bedasarkan pekerjaan .....	81
Tabel 3.7 Struktur organisasi BUMDes .....	86
Tabel 3.8 Persentasi kependudukan dengan ekonomi .....	130







# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan kesadaran masyarakat dalam ranah pembangunan. Kondisi ini dilihat dari banyaknya aktivis-aktivis sosial yang terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada tingkat regional, nasional maupun global (Adisasmita 2006: 3).

Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang diketahui 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan (Khairil Amri, 2015: 295). pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan

kota. Pembangunan perdesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan (Maria, 2010: 155).

Pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam BUMDes yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Maria, 2010: 155).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Ilham Maulana dalam Wahjudin (2016: 72) menyatakan bahwa Pemberdayaan di pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk di bangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Praktiknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian lebih dikenal dengan *participatory rural appraisal* (Wahjudin, 2016: 75).

Asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas utama UU Desa telah mendorong negara mengakui dan menghormati hak asal usul Desa dan menetapkan kewenangan lokal skala Desa. Pengakuan dan penghormatan negara tersebut seperti jelas tercermin dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa, yaitu:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 2017: 8)

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia yang handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis (Ghozali, 2015: 8-9).

Pemberdayaan desa sebagai *self governing community* tidak dilakukan oleh pendamping desa. Pendampingan desa yang sejati adalah kerja fasilitasi kepada masyarakat desa untuk mampu secara mandiri melakukan pembaharuan dan pembangunan desanya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat Desa yang sejati adalah sebuah bagian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh warga desa yang mampu hadir sebagai agen pembaharuan yang menggerakkan implementasi UU Desa secara mandiri. (Ghozali, 2015: 8-9).

Di desa Jati Kulon ini, masih banyak masyarakat yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dikarena keterbatasan ekonomi. Dari 204 pelajar SD/ sederajat 93 pelajar yang tidak tamat SD/ sederajat, dan dari 1.750 pelajar SLTP 9 pelajar yang tidak tamat SLTP, dari 2.829 pelajar tamatan SMA/ sederajat yang melanjutkan kejenjang pendidikan perguruan tinggi hanya 180 pelajar, hal tersebut menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat ekonomi. Dimana dalam perekonomian masyarakat desa Jati Kulon, dari 8.225 jumlah penduduk 360 orang yang masih aktif sekolah dan 535 orang yang bekerja tidak menentu (Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Jati Kulon, 2018: 15-16).

Dari kondisi masyarakat desa Jati Kulon ini perlu adanya pemerataan memperoleh pendidikan baik formal maupun nonformal untuk peningkatan perekonomian dan kemandirian masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan kaya dan miskin, pendidikan, sosial, kesenjangan masyarakat desa dan masyarakat kota serta pembangan yang dilakukan secara berencana dapat tepat pada sasaran yang tidak lain yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dimana telah dijelaskan dalam surat Ar Ra'd ayat 11 tentang pengembangan masyarakat Islam:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا يَفْعَلُ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S, 13: 11) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006: 336).*

Dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, pendidikan, maupun kesenjangan masyarakat desa dan masyarakat kota. Pembangunan perdesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan (Kasiyanto, 1994: 55).

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010

tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Herry, 2016: 2). Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Pengembangan BUMDes itu juga menjadi kebijakan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melanjutkan kebijakan ini, selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) telah memfasilitasi pendirian BUMDes Bersama di sejumlah kabupaten. Prakarsa awal ini membangkitkan minat banyak daerah dan Desa untuk mendirikan BUMDes secara mandiri, dan pada saat yang sama ada usulan dari banyak daerah kepada Ditjen PKP untuk memfasilitasi lebih lanjut. Dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan

BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Herry, 2016: 2).

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan) (Nyoman, 2016: 5).

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Kudus, yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten kudus Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Kudus tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Mengenai permasalahan Desa Jati kulon yang terletak disekitar kawasan industri seringkali tercemari oleh limbah dari pabrik baik kertas, kaca, plastik, karet, besi, baja, tembaga, alumunium dan sampah rumah tangga. Belum lagi pada waktu musim penghujan sering kali masyarakat desa terkena penyakit Demam Bredara (DB), karena tidak ada pengelolaan terkait limbah yang ada di desa Jati Kulon. Selain itu, desa Jati kulon juga sebagian besar merupakan

daerah pertanian. Dimana terkadang para petani gagal panen karena pada waktu penghujan desa Jati Kulon menjadi langganan bajir aliran sungai yang tersumbat sampah yang belum terkelola. Belum lagi pada musim kemarau tidak jarang juga desa Jati Kulon mengalami kekeringan.

Keberadaan pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan yang ada selama ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor yang mendominasi adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya proses kegiatan pembangunan menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Dimana sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat.

Mengingat adanya permasalahan tersebut baik pemerintah maupun masyarakat harus menyadari dan merubah permasalahan tersebut potensi yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, tentu menjadi bahan pemerintah maupun aktivis non pemerintah dalam proses pembangunan. Dimana peningkatan pemanfaatan sumberdaya manusia juga menekan pada sumberdaya alam.

Konsep pembangunan perlu diimbangi dengan arah pembangunan dengan melihat potensi lokal dan perubahan lingkungan yang strategis.

Desa Jati Kulon merupakan salah satu desa di Jati Kabupaten Kudus. Desa ini memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakatnya melalui BUMDes, diantaranya potensi pengelolaan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis, dimana dalam pengelolaan sampah ini dibualah bank sampah dimana masyarakat dapat memijam uang untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, tambahan untuk modal usaha dan lain sebagainya dengan maksimal pemijaman Rp 500.000. Dimana pemijaman uang tersebut tidak boleh dikembalikan berupa uang, tetapi sistem pengembaliannya harus dengan sampah yang sudah di pilih. Selain itu desa Jati Kulon juga mengadakan Pamsi Mas untuk pengadaan air bersih dan juga pasar Desa untuk kegiatan ekonomi masyarakat desa Jati Kulon dimana lokasinya yang strategis serta dekat dengan keramaian. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Disamping itu, BUMDes Sumber Pangan Sejati merupakan lembaga pemerintah desa Jati kulon yang menaungi kegiatan dalam sektor industri rumah tangga,

pertanian, perdagangan, peternakan dan jasa. Pembangunan pengembangan pedesaan ini juga menjadi daya tarik pemerintah pusat. Desa Jati kulon dinobatkan sebagai desa Tematik dan Inovatif dari 132 desa diwilayah Kudus berbasis pada potensi lokal. Desa Tematik merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Jamudesa: 2018).

Harapan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes disetiap desa yang ada di Kabupaten Kudus belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Hanya terdapat beberapa desa yang membentuk dan mengelola BUMDes, misalkan Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Jati Kulon sudah dijadikan sebagai referensi untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes di kabupaten Kudus maupun kabupaten lain. desa yang

menjadikan referensi BUMDes diantaranya desa Undaan Kidul, desa Garung Lor, desa Gondosari, Desa Rahtawu. Selain itu juga, dijadikan *study* banding dari kabupaten Rembang, kabupaten Wonosobo. Peran Pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti terkait dengan Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimanakah Hasil pemberdayaan masyarakat Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Tujuan Penelitian:

- a) Untuk mengetahui peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- b) Untuk mengetahui hasil yang dilakukan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoretis

Memberi masukan bagaimana mengenai peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BUMDes desa Jati Kulon dalam memberdayakan masyarakat desa.

### b) Manfaat secara praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di desa oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terkait permasalahan penanganan dan pengembangan kreatifitas masyarakat, dalam hal ini BUMDes Desa Jati Kulon berupaya meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan sosial untuk dikelola menjadi barang yang bernilai ekonomi. Sebagai salah satu sumber data dan informasi pengetahuan terkait pemberdayaan

masyarakat desa melalui pengelolaan sampah baik di desa maupun di kota.

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosial, keagamaan, maupun akademik melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pembaca dapat mengetahui bahwa perangkat desa dalam program kerja BUMDes Desa Jati Kulon memberikan partisipasi aktif dalam memberikan sumbangsih terhadap masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil terkait tentang penelitian yang sejenis dengan kajian seperti ini menunjukkan, bahwa penelitian ini bukanlah studi pertama seputar badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat. Peneliti berusaha menelusuri dan menela'ah berbagai hasil kajian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berbagai kajian yang berkaitan tentang pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: Penelitian yang ditulis oleh Rufaidah Aslamiah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 dengan judul skripsinya “Peran BUMDes Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Keunikan dalam penelitian ini adalah merubah sampah menjadi sumber energi, menjadi kompos, pupuk, ataupun bahan baku industri yang kesamannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat melalui (KUPAS) Panggung Lestari dan juga dampak sosial-ekonominya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian deskriptif kualitatif dengan menganalisa dan meninterpretasi data. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya KUPAS permasalahan sampah dapat dikelola dengan baik, terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat, serta kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Kedua: penelitian yang ditulis oleh Rismawati, Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018 dengan judul skripsinya “Peranan BUMDes Perwitasari Dalam upaya meningkatkan Perekonomian

Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”. Keunikan dalam penelitian ini adalah BUMDes Perwitasari sebagai promotor penggerak perekonomian masyarakat minapolitan melalui pengembangan masyarakat islam melalui potensi desa dan berbasis pada hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaen Kendal dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaen Kendal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam pelaksanaanya. Seiring perkembangannya BUMDes Perwitasari juga meningkatkan kesehatan lingkungan pada Masyarakat Desa Tambaksari.

Ketiga: penelitian yang ditulis oleh Agung Septian Wijanarko, 2012 dengan judul skripsinya “Peran BUMDes

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”. Keunikan dalam penelitian ini adalah Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Pandankrajan yang masih rendah karena masyarakat Desa Pandankrajan rata-rata bekerja sebagai petani. Tujuan Penelitian ini adalah Mendeskripsikan Peran BUMDes didalam pemberdayaan masyarakat Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, tepat tempat. Hasil penelitian ini adalah

- 1) pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai.
- 2) pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai.
- 3) upaya BUMDes untuk menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa terpenuhi. Kurangnya dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpanan sukarela.
- 4) upaya BUMDes dalam memberi pinjaman kepada anggota telah membantu untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat, hal ini tujuan BUMDes untuk mencapai kesejahteraan masyarakat telah tercapai.

Keempat: Penelitian yang ditulis oleh, Satika Rani, 2018 dengan judul skripsinya “Peran Dan Kontribusi BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”. Keunikan dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai inisiatif masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Studi pada BUMDes di Desa Karya Mulya Sari kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sample yaitu Random Sampling. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya

ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES Karya Abadi itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan islam, masyarakat Desa Karya Mulya sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al-hajjiyyah (sekunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap).

Kelima: Penelitian yang ditulis oleh, Nofiratullah, 2018 dengan judul skripsinya “Eksistensi BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Keunikan dalam penelitian ini adalah BUMDes merupakan merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social Instution<sup>0</sup> dan komersil (commercial intution dimana BUMDes merupakan lembaga yang meprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasidalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah eksistensi BUMDes dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada judul “Peran KPMD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus”. Penelitian ini menekankan bahwa dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Desa Jati Kulon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah. Sementara itu, Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif untuk menganalisa data.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jonatan (2006: 209) Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Sosial kooperatif (kerjasama), suatu bentuk proses sosial dimana

didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Dimana kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengartikan setiap pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Basrowi, 2014: 145).

## 2. Definisi Konseptual

- a. peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya di tentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan dari masing-masing sosial masyarakat yang berkaitan akan menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.
- b. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya, yaitu dari aspek intelektual

(sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai pada aspek manajeriala. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

- c. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDesa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDesa dapat member kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat

### 3. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer merupakan teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan

observasi dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya, data diambil dari informasi lapangan.

- b. Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca melihat atau mendengar (Jonatan, 2006: 209).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002) dalam Imam (2013: 143). Menurut (Kartono 1980) dalam Imam (2013: 143) observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Imam, 2013: 143).

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2010: 311) menyatakan, bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih (Sugiyono, 2010: 311).

Observasi itu sendiri ada 3 macam yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang dan tersamar, serta observasi tak terstruktur. Observasi partisipatif sendiri terbagi menjadi empat golongan yaitu; partisipatif pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap. Pada observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi pasif, yang artinya peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2017: 226-228).

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati aktivitas BUMDes Sumber Pangan Sejati Jati Kulon. Selain itu, penulis mendengarkan apa yang dikatakan oleh para informan tanpa menutup diri sebagai penelitian dan pengamatan akan dilaksanakan secara partisipatif (Sugiyono, 2010: 311).

b. Wawancara (*Interview*)

Esterbreg (2002) dalam Sugiyono (2010: 317) wawancara merupakan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri. Dengan tehnik ini penulis dapat berhadapan langsung dengan informan sehingga akan didapatkan informasi yang akurat sesuai dengan sistematika pertanyaan yang diajukan kepada informan. Oleh karena itu, dihadapkan dengan tehnik Interview atau wawancara, penulis dapat memperoleh informasi dan memperoleh hasil yang akurat. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sugeng selaku kepala desa Jati Kulon dan beberapa informan yang ada di BUMDes Sumber Pangan Sejati (perangkat Desa Jati Kulon) serta anggota BUMDes Sumber Pangan Sejati.

c. Dokumen

Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

monumental. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi juga merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, prasasti, notulen rapat, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sebagainya. Dengan dokumentasi ini dapat diperoleh data monografi serta demografi penduduk, guna memenuhi kelengkapan peneraan penelitian tentang gambaran umum wilayah objek penelitian. (Sugiyono, 2010: 329).

d. Triangulasi

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dalam mengecek keabsahan data ini, penulis juga menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang secara serempak (Sugiyono, 2010: 311).

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain(Sugiyono, 2010: 335). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menganalisa dengan panjang lebar yang pelaksanaanya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis data dan interpretasi data (Winarno, 1994: 45).

Hasil dari pengamatan (Observasi) dan wawancara di lapangan kemudian diolah dengan menyusun dalam uraian yang lengkap, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta berkaitan dengan masalah sehingga data yang direduksi

memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

##### 1. Konsep Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa tingkah laku yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus di laksanakan.(Aplikasi Play Stor KBBI: 2019) Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Janu, 2007: 25). Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

- c. *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. *Role Set* Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat
- d. Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.

Menurut Sarlito Wirawan dalam Soerjono (2002: 243) bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan dari masing-masing sosial masyarakat yang berkaitan akan menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat

(lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran (Soerjono, 2002: 243).

peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2006: 212), menjelaskan bahwa peranan atau (*role*) secara substansial merupakan aspek dinamis (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Sementara itu, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soejarno, 2006: 212).

Sementara itu, menurut Miftah Thoha (2012:10). Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk

berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparatur desa cukup kompleks, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan dan ketertiban”, pelayanan: mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera (Asrori, 2014: 101).

## 2. Peran Masyarakat

Ketentuan Pasal 80; Pasal 81 dan Pasal 82 UU Desa mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Selain itu masyarakat

desa dijamin haknya dalam memantau dan mengawasi pembangunan.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak menyampaikan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan serta akses dan kontrol terhadap sumber daya.

Perencanaan pembangunan desa mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk kelompok miskin dan rentan di antaranya anak-anak, perempuan, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Masyarakat desa juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah desa, pendamping desa dan BPD harus menjamin kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan secara sosial dan budaya, seperti perempuan, anak-anak dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus akan tertampung kepentingannya dalam musyawarah desa.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. *Pertama*, melibatkan kelompok masyarakat miskin dan

terpinggirkan dalam musyawarah desa, baik dalam penilaian kebutuhan maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan musyawarah. *Kedua*, bila ada hal-hal yang menghambat kelompok miskin terlibat dalam proses karena keterbatasan akses, kapasitas dan apatisme maka BPD dan fasilitator harus memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan serangkaian metode dan alat untuk menjadikan prioritas belanja lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan (Nyoman, 2016: 7 -8).

### 3. Peran Pemerintah Desa

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunannya sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

BPD bertanggung jawab menyelenggarakan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca-musyawarah:

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompokkelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan musyawarah desa.
- b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.
- c. Tahap pasca-musyawarah desa, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan musyawarah dan rekomendasi kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintahan desa (Nyoman, 2016: 9 -10).

#### 4. Peran Pemerintah Daerah

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Bab I Pasal 2, bahwa pemerintah desa dalam rangka penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan desa

didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya (Nyoman, 2016: 11-12).

#### 5. Peran Pendamping

Regulasi yang ada mengatur bahwa pendampingan desa adalah tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak lain. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 diperinci beberapa pihak yang dapat terlibat dalam pendampingan.

*Pertama*, pendamping profesional yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan provinsi, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota dan pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan.

*Kedua*, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal dari warga desa setempat yang

dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

*Ketiga*, pendamping pihak ketiga yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan lainnya.

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa PDPTT Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 13 dan 14, pemerintah daerah dibantu oleh pendamping teknis di tingkat kabupaten/kota. Secara umum, pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Tugas pendamping teknis meliputi:

- a. Membantu pemerintah daerah menyinergikan perencanaan Pembangunan desa.
- b. Mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Desa.
- c. Melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa (Nyoman, 2016: 14 -16).

Sementara itu, menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Seyadi, 2003: 16)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa indikator peran adalah peraturan, konsep, hak dan kewajiban sebagai kaidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu yang berupa objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya yang wajib dilaksanakan. Interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peran. Tidak jarang bahwa dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang

tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah kewajiban belaka

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Konsep Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* menuju pada penguasaan pengetahuan,

sikap-perilaku sadar dan kecakapan atau keterampilan yang baik.

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan *penguatan modal social* (Apabila kita sudah memberikan kepercayaan (*trusts*), Taat aturan (*role*), jejaring (*networking*)) dan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer *knowledge* kepada masyarakat. Melalui modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *Knowledge*, modal (*money*), dan sumber daya manusia (*people*). Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal sosial yang kuat akan menjamin sustainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build thr trust*) (Wahjudin, 2016: 111).

Jimmu, (2008) dalam Wahjudin (2016: 112) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana membangun pedesaan tetapi memiliki arti yang lebih luas bagaimana mendorong perubahan dan kekuatan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas dirinya. Membangun komitmen pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika melihat struktur tersebut, berbeda dengan kualitas fisik dari dunia luar. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya.

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dimana pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi,

demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people centred, participatory, empowering, and sustainable”* (Wahjudin, 2016: 112).

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang menfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya, yaitu dari aspek intelektual (sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai pada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Pemberdayaan merupakan tanggung jawab utama dalam program pembangunan, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati secara fisik. Akan tetapi, yang lebih penting adalah masyarakat menjadi berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelmbagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip

pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*) (Miftahul, 2009: 272).

Dimana tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah

- a. Membantu percepatan proyek-proyek pembangunan masyarakat pedesaan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti air bersih, listrik, perumahan, jalan, dan usaha ekonomi produktif.
- b. Mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial warga masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan.
- c. Mendorong dan meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, seperti DPD, PKK, KUD, Karang Taruna, untuk aktif secara fungsional dalam proses pembangunan masyarakat desa.
- d. Mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan masyarakat dalam pembangunan, sebagai alternatif dalam mempercepat pemerataan pembangunan,

menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, dan menjaga tabilitas pembangunan.

- e. Mengembangkan jaringan kerja antar lembaga pembardayaan agar yerjalin kerjasama dan keterpaduan antarprogram pemenuhan kebutuhan dasar, program pembangunan kualitas manusia, dan program peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f. Mengembangkan pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya Rappaport, (1984) dalam Suharto (2014: 58).

## 2. Prinsip Pemberdayaan

Adapun prinsip utama dalam mngembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drivijer dan Sajise dalam Wahjudin (2016: 114) terdiri atas sebagai berikut.

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini, pengelolaan dan para *stakeholder* menyetujui tujuan yang akan dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa

kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Partisipasi (*participation*) yaitu setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep berkelanjutan, yaitu pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi,
- d. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi, yaitu bagian dari program pengelolaan.

### 3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 79).

(Wahjudin, 2016: 115). Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa

memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke 18 waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Ife, (1995) dalam Suharto (2014: 57).

Menurut Sulistiyani mengatakan tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut: “yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuti apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk

memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut” (Sulistiyani, 2004: 80).

Tujuan pemberdayaan Komunitas (Mardikanto, 2015):

- a. Perbaiki kehidupan (better living), memperbaiki keadaan hidup setiap keluarga dan masyarakat.
- b. Perbaiki aksesabilitas (better accesability), utamanya tentang aksesabilitas informasi/inovasi.
- c. Perbaiki pendidikan (better education).
- d. Perbaiki tindakan (better action), dengan perbaikan pendidikan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang makin baik.
- e. Perbaiki kelembagaan (better institution), termasuk pengembangan jaringan.
- f. Perbaiki usaha (better busines).
- g. Perbaiki pendapatan (better income).
- h. Perbaiki lingkungan (better environment), baik fisik maupun sosial.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya/kemampuan yang dimiliki. (Lilik, 2016: 10).

#### 4. Pemberdayaan Sebagai Sistem Sosial

Talcott Parsons (1991) dalam Wahjudin (2016: 116) melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh

dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

Parsons (1991) menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu:

- 1) Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- 2) Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
- 4) Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Dengan demikian bangun sebuah sistem pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk mendorong kemampuan masyarakat melakukan adaptasi, pencapaian

tujuan, pengintegrasian berbagai komponen dan hubungan sosial serta memelihara secara keseluruhan dalam bangun structural dan kultural.

#### 5. Pendekatan Pemberdayaan

Kekurangtepatan pemilihan strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakatnya telah menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut: (1) Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*); (2) Melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara sedang berkembang terhadap negara maju; (3) Melahirkan ketergantungan (*dependency*) *pheriphery* terhadap center; (4) Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat terhadap negara/pemerintah; (5) Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan dll) terhadap pemilik modal.

Pada dasarnya, (Wahjudin, 2016: 116) pendekatan konvensional ini ditandai oleh transplantatif planning, *top down*, induktif, *capital intensive*, *west-based technological transfer*, dan sejenisnya. Beberapa paradigma pendekatan pembangunan mulai mengalami

pergeseran dari yang konvensional menuju pembangunan alternatif, yaitu: (1) Pembangunan wilayah (*regional development*); (2) Pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*); (3) Pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*); (4) Pembangunan berpusat pada rakyat (*people-centered development*); (5) Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); (6) Pembangunan berbasis kelembagaan (*institution-based development*).

Ciri yang membedakan pendekatan alternatif tersebut adanya penekanan terhadap lokalitas, baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan, maupun budaya (*culture*). Implikasi kebijakan pendekatan ini adalah penekanan pada *transformative and transactive planning*, *bottom up*, *community empowerment*, dan *participative*, semuanya ini terkenal dengan Pembangunan komunitas (*community development*). Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan

harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan (Wahjudin, 2016: 116).

Pendekatan lain adalah model pembangunan desentralisasi. Secara riil pendekatan ini juga tidak mampu mengekspresikan secara penuh dari makna desentralisasi tersebut. Bagian yang disentralisir hanyalah pada fungsi pelaksanaan saja yang diserahkan pada pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan keuangan tetap menjadi bagian dari pemerintah pusat. Adapun tiga model dalam praktek dan pembangunan masyarakat, yaitu *locality development*, *social planning* dan *social action*.

#### 1) Model Pembangunan Lokal (*Locality Development*)

Model pembangunan lokal adalah bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas disemua spektrum masyarakat tingkat lokal. Tujuan yang dicapai tidak hanya tujuan akhir, melainkan juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara integratif.

- 2) Model Perencanaan Sosial (Social Planning Model)  
Menekankan pada pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, seperti kenakalan remaja, pemukiman, kesehatan mental dan masalah sosial lainnya. Model ini menganggap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam model pendekatan ini adalah menciptakan, menyusun dan memberikan bantuan-bantuan baik yang bersifat materi maupun pelayanan- pelayanan yang berbentuk jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam model ini yang ingin dikembangkan adalah kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan- permasalahan melalui usaha-usaha terencana, terarah dan terkendali.
- 3) Model Aksi Sosial (Sosial Action Model) Model ini menekankan betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak berbentuk secara terorganisir, terarah, sistematis dan meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau

perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial atau demokrasi. Bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar di dalam lembaga utama atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Model ini juga menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, atau dalam hal pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan organisasi-organisasi formal (Harry, 2001: 67).

Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Secara langsung upaya ini ditujukan kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikut-

sertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.

Disamping itu, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pengalamannya dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena kelompok masyarakat miskin sangat sulit memecahkan masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Wahjudin, 2016: 116).

#### 6. Tahapan Pemberdayaan

Wilson (1996) dalam Wahjudin (2016: 117) menguraikan tentang siklus pemberdayaan masyarakat dalam tujuh tahapan. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan

komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Sumodiningrat, (2002) Ditinjau dari proses, gagasan pemberdayaan memiliki dua kecenderungan,

antara lain: *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog .

*Kedua*, konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif

dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Wahjudin, 2016: 117).

### **C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **1. Konsep BUMDes**

BUMDes merupakan badan usaha yang bercirikan Desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. UU No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa) (Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 2017: 10).

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan

desayang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014 ). Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008) dalam Supriyanto (2017: 99), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDesa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDesa harus memiliki perbedaan

dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDesa dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat (Supriyanto, 2017: 99).

BUMDes dimaksudkan unit mengelola usaha-usaha dipedesaan untuk memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat Desa, melindungi kepentingan umum, dan menfasilitasi kegiatan pelayanan publik Desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa merupakan bagian penting dari proses pembangunan desa melalui penguatan ekonomi pedesaan. BUMDes pada dasarnya merupakan upaya konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-Lembaga ekonomi pedesaan. sebagai lembaga ekonomi milik desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan secara mandiri menurut (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 5).

Didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa” (Anom, 2015: 11). Sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan harus difokuskan pada Pengembangan lembaga ekonomi desa yang dibentuk yaitu BUMDes Keberadaan BUMDes merupakan intervensi kelembagaan ekonomi yang menyatu dengan masyarakat perdesaan. BUMDes harus dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang mandiri untuk menunjang seluruh aktivitas pengembangan ekonomi produktif dipedesaan. BUMDes bukan milik sekelompok masyarakat, tetapi merupakan milik desa yang dikelola oleh masyarakat perdesaan secara profesional dan mandiri agar memberikan manfaat bagiseluruh peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Oleh sebab itu, dalam pendirian BUMDes haru memperhatikan prinsip-prinsip:

### a. Berbasis Lokal

Pendirian BUMDes harus disesuaikan dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan masyarakat desa. Bidang usaha yang akan dilakukan harus didasarkan pada daya dukung lokal desa, baik SDM, SDA teknologi, permodalan, pasar dan akses informasi. Usaha-usaha yang dilakukan harus didasarkan pada kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat dan permasalahan yang dihadapi masyarakat perdesaan, untuk menjamin peningkatankualitas hidup seluruh warga desa (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 8).

### b. Partisipasi

Pembentukan dan pendirian BUMDes harus dilakukan secara partisipatif dan inisiatif masyarakat desa. Hal ini menjadi penting karena BUMDes harus menjadi stimulasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan lebih mengetahui secara pasti dan terinci tentang semua potensi dan sumberdaya desa. Pelibatan

secara aktif seluruh masyarakat perdesan dalam pendirian dan pelaksanaan BUMDes menjadi penting untuk menggalang partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan desa.pentingnya partisipasi karena potensi dan sumberdaya yang dikembngkan oleh BUMDes berasal dari seluruh komponen masyarakat. Partisipasi seluruh masyarakat akan menjadi kekuatan besar untuk membangun perekonomian desa secara berkesinambungan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 8).

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dikedepankan dalam pembangunan BUMDes, yang menetapkan masyarakat sebagai kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif dalam pembangunan ekonomi. Pendirian dan penegmbangan BUMDes yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat agar BUMDes tersebut ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*).pemberdayaan dalam pendirian dan pengembangan BUMDes juga dimaksudkan

sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut, sehingga BUMDes menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan profesional melalui usaha masyarakat dan pemerintah desa dengan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 9).

d. Berpihak Pada Masyarakat

BUMDes yang didirikan dan dikelola harus memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomimasyarakat perdesaan, dan bermanfaat bagi seluruh proses pembagunan perdesaaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnyabagi mayarakat danmemberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat miskin.keuntungan BUMDes harusdirahkan pada pembangunan yang melayani seluruh kehidupan masyarakat perdesaan, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan pembagunan perdesaan lainnya (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 9).

e. Demokrasi

Pendirian dan pengembangan BUMDes Harus menerapkan prinsip demokratisasi dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Demokrasi seharusnya menjiwai pendirian dan pengelolaan BUMDes, agar dapat melayani kepentingan masyarakat perdesaan. Dengan semangat demokrasi, maka segala aktivitas BUMDes harus disesuaikan kebutuhan masyarakat dan pengambilan keputusan lainnya melibatkan masyarakat secara aktif (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 9).

f. Akuntabel

BUMDes yang didirikan dan dikelola secara dengan transparansi dan akuntabel. Proses dan tahapn kegiatan yang dilakukan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintahan desa maupun pada masyarakat. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan di pertanggunggatkan, baik secaramoral, teknis, legal, maupun

administratif (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 10).

g. Keberagaman

Pendirin dan penegmbangan BUMDes pada dasarnya dimaksudkan unuk mengembangkan potensi perekonomian diwilayah perdesaan guna mendorong kemampuan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, BUMDes berperan mengembangkan ekonomi produktif perdesaan yang mampu membuka lapangan kerja ddalam rangka mengatasi pengangguran, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberagaman potensi dan sumberdaya desa mengimplikasikan bahwa pendirian BUMDes juga beragam sesuai dengan potensi dan sumberdaya desa tersebut. Keberagaman BUMDes ini dapat dalam hal bidang usaha, organisasi, sumber permodalan, dan lain-lain yang berkaitan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 10).

Selain prinsip-prinsip diatas, maka pendirian dan pengelolaan BUMDes juga haru mengedepankan norma dan kearifan lokal yang berlaku secara lokal di perdesaan. Pengelolaan

BUMDes harus dilandasi oleh prinsip keanggotaan bagi seluruh masyarakat desa dan saling membantu. Hal ini menjadi penting untuk mencegah timbulnya penciptaan BUMDes sebagai lembaga renter perdesaan, dan mencegah penguasaan oleh sekelompok tertentu terhadap aktivitas ekonomi perdesaan. Pendirian BUMDes diutaakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 8-10).

Pemberdayaan bisa mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh sekumpulan maupun individu. Namun yang paling dekat dengan kita, dan yang paling mudah dipahami bahwa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti mampu atau mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN**

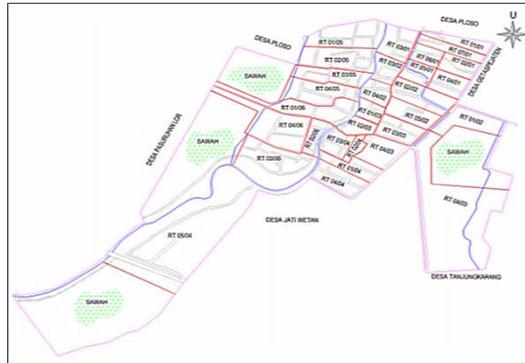
#### **A. Gambaran Umum Desa Jati Kulon**

##### **1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah**

Desa Jati Kulon adalah salah satu desa di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Desa Jati Kulon mencapai angka 187,28 Ha, dengan luas pemukiman 115,39 Ha, luas persawahan 34,39 ha, luas perkarangan 28,38 Ha, luas perkantoran 1,00 Ha, luas prasana umum lainnya 7,38 Ha. Desa Jati Kulon terbagi menjadi 6 RW dan 29 RT. Secara geografis Desa Jati Kulon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara desa Ploso, Kecamatan Jati, kabupaten Kudus.
- b. Sebelah selatan desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
- c. Sebelah barat desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
- d. Sebelah timur desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Gambar 3.1: peta desa Jati Kulon



Sumber: Dokumentasi Desa Jati Kulon

Secara geografis, desa Jati Kulon ini berada di ketinggian 17 dari permukaan air laut. Dari segi monografi, desa ini berada pada daratan rendah dengan suhu udara rata-rata 26°C. Jika dilihat dari orbitasi jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 1 Kilometer, sedang dari pusat Pemerintahan Kabupaten berada sejauh  $\frac{1}{4}$  jam lama jarak yang ditempuh dengan kendaraan bermotor. 1,5 kilometer dari sebelah barat Jalan Raya Kudus-Pati (Dokumen: Profil Desa Jati Kulon, 2018).

Desa Jati Kulon ini berada di wilayah industri dan perkantoran dimana lokasi desa Jati Kulon juga berada di dataran rendah, sehingga desa Jati Kulon ini rawan akan banjir ketika musim penghujan. Selain itu, tidak sedikit

juga limbah yang ada di desa baik limbah padat, cair, gas dan limbah rumah tangga. Oleh sebab itu, desa Jati Kulon ini mengadakan 6 program inovasi desa dari 6 RW untuk peningkatan perekonomian, kesejahteraan dan kesadaran masyarakat desa Jati Kulon diantaranya: Kampung Padang Bulan yang berada di RW 01, Kampung Bunga Citra Lestari yang berada di RW 02, Kampung Keluarga Berencana (KB) yang berada di RW 03, Kampung Industri yang berada di RW 04, Kampung Asi yang berada di RW 05, dan Kampung sampah yang berada di RW 06.

Lewat program inovasi tersebut, desa Jati kulon juga menjadi tempat studi daerah lain. Diantaranya yang melakukan studi banding tentang pengelolaan sampah dan inovasi desa, dari kades se-kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan Tuban Sidoarjo.

#### Visi Desa Jati Kulon

Lanjutkan mewujudkan Desa Jati Kulon yang toto titi tentrem kerto raharjo.

Keinginan untuk mewujudkan agar masyarakat Desa Jati Kulon yang “Toto Titi” dalam arti terwujudnya tatanan kehidupan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan saling menghargai sesama umat

beragama, kehidupan sosial yang harmonis, kehidupan perekonomian yang dinamis serta berupaya semaksimal mungkin menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Keinginan untuk mewujudkan masyarakat Desa Jati Kulon yang “Tentrem” yaitu tetap menjaga kondisi dan tatanan perikehidupan yang aman dan damai sebagai prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan yang merupakan proses dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera.

Keinginan untuk mewujudkan masyarakat Desa Jati Kulon yang “Kerto raharjo” yaitu kondisi dan tatanan perikehidupan yang sejahtera dalam naungan rahmat dan ridlo dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

#### Misi Desa Jati Kulon

Untuk mewujudkan visi Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2019 tersebut, maka dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Jati Kulon yaitu :

1. Membangun keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menumbuh kembangkan perilaku kehidupan yang baik serta saling menghormati dalam kehidupan masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara.
3. Menciptakan dan mengembangkan sumber pendapatan untuk mencapai kehidupan masyarakat desa yang layak, serta pelayanan masyarakat secara berkeadilan yang berpihak pada kepentingan dan pemberdayaan pada masyarakat luas.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa Jati Kulon secara cepat dalam mengurus surat ke desa sesuai atauran yang berlaku;
5. Terpenuhiya tingkat kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan Polindes dan bidan desa.
6. Meningkatkan Pemerintah Desa Jati Kulon yang tertib Administrasi, bersih dan berwibawa tanpa Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
7. Pembangunan infrastruktur dengan tetap mengedepankan dan mengacu pada asas pemerataan secara proporsional serta skala prioritas termasuk pemeliharaan keberadaan infrastruktur yang sudah ada;
8. Tetap menjaga iklim sejuk di antara sesama pemeluk agama.

9. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif dan bersih dari perjudian;
10. Tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan perusahaan-perusahaan yang ada Desa Jati Kulon  
(Sumber: Data RPJMDes 2013)

**Tabel 3.1**  
**Struktur organisasi desa Jati Kulon**

No	NAMA	JABATAN
1	Sugeng Prasetyo	Kepala Desa
2	Pita Jatika	Sekretaris Desa
3	Sutopo	Kepala Seksi Pemerintahan
4	M. Jumadi	Kepala Seksi P2MD
5	Siswanto	Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat
6	Rachmat Sunandar	Kaur Umum
7	Intan Fitri Y.	Kaur Keuangan
8	Suparmin	Kaur Perencanaan
9	Komaruddin	Kepala Dusun 1
10	Rasmu Hidayat	Kepala Dusun 2
11	Nur Setiawan	Kepala Dusun 3

*Sumber Dokumen: Profil Desa Jati Kulon, 2018*

## 2. Kondisi Demografi

### 1. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk desa Jati Kulon terhitung 2019 berdasarkan laporan monografi desa sebanyak 2618 KK yang terdiri dari 8.225 orang. Seluruhnya berwarganegara Indonesia dengan jumlah laki-laki 4.029 orang dan jumlah perempuan 4.196 orang.

**Tabel 3.2**

**Jumlah penduduk Desa Jati Kulon menurut jenis kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.029
2	Perempuan	4.196
	Jumlah	8.225

*Sumber: Data Monografi tahun 2018*

### 2. Keadaan penduduk menurut umur

Keadaan penduduk menurut umur dapat dibedakan kedalam dua kelompok usia yaitu usia bertanggung dan usia kelompok usia tenaga kerja.

**Tabel 3.3****Jumlah penduduk menurut usia**

Rentang usia (tahun)	Jumlah	Presentase (%)
0-3	552	7
4-6	407	5
7-12	795	10
13-15	376	5
16-18	351	4
Diatas 19	5.744	70
Total	8.225	100

*Sumber: Dokumen Data Monografi tahun 2018*

**Tabel 3.4****Jumlah penduduk menurut kelompok tenaga kerja**

Rentang Usia 18 – 56 (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
Yang bekerja	3.821	51
Belum / tidak bekerja	207	3
Balita	808	11
Masih sekolah	1.504	20

Diatas 56	1.188	16
Total	7.528	100

*Sumber: Dokumen Data Monografi Desa Jati Kulon tahun 2018*

Berdasarkan usia, jumlah total warga yang masih menjalani pendidikan baik SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi adalah 2.065 orang dan warga yang telah menjadi kelompok kerja adalah berjumlah 3.821 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Jati Kulon memiliki usia non produktif.

### 3. Keadaan penduduk menurut agama

Setiap orang berhak memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masyarakat di desa Jati Kulon ada beragam agama yaitu agama Islam, Kristen, dan Katholik. Keadaan penduduk menurut beragam adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Keadaan penduduk menurut agama**

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	7.754
2	Kristen	310

3	Katholik	153
4	Budha	8
	Total	8.225

*Sumber: Dokumen Data Monografi Desa Jati Kulon tahun 2018*

Melihat data diatas dapat diketahui mayoritas penduduk di desa Jati Kulon merupakan pemeluk agama Islam. Yaitu sebanyak 7.754 orang memeluk agama Islam, pemeluk agama Kristen sebanyak 310 orang sedangkan pemeluk agama Katholik memiliki persentasi paling sedikit dengan pemeluk 153 orang dan Budha 8 rang. Meskipun ada perbedaan dalma agama di masyarakat desa Jati Kulon, interaksi sosial masyarakat terjalin dalam kegiatan desa. Kegiatan gotong-royong yang biasanya terjalin dalam kegiatan membersihkan lingkungan, ronda atau siskampling dan memperbaiki sarana prasarana desa.

### **3. Keadaan Sosial Ekonomi**

Desa Jati Kulon terletak pada dataran rendah. Luasnya lahan-lahan di desa Jati Kulon dijadikan desa ini sebagai desa tematik yang terdiri dari 6 tema Untuk meningkatkan ekonomi rakyat, pada tahun 2017 Desa Jati Kulon

mencanangkan kampung tematik, dengan tema “1001 inovasi”. Adapun tema-tema tersebut berbeda-beda pada setiap RW, diantaranya: RW 1, Kampung Padang Bulan.. RW 2, Kampung Homestay. RW 3, Kampung Kuliner. RW 4, Kampung Industri.. RW 5, Kampung Tempean. RW 6, Kampung Agro. Mata pencaharian di desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus bervariasi.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 2018.

**Tabel 3.6**

**Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan**

Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
Petani	67	6
Pegawai Negeri Sipil	131	11
Industri rumah tangga	23	2
Pedagang keliling	202	17
Peternak	2	0,001
Montir	27	2
Dokter swasta	7	1
Perawat swasta	20	2
TNI	4	0,004

Polri	6	0,005
Karyawan perusahaan swasta	2.163	42
Karyawan perusahaan pemerintah	21	2
Guru	129	11
Tukang kayu, batu, jahit	51	4
Total	1211	100

*Sumber: Dokumen Data Tingkat Perkembangan Desa Jati Kulon 2018*

Berdasarkan tabel 1.6 dapat di ketahui mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai karyawan perusahaan, baik karyawan perusahaan swasta maupun negara. Desa Jati Kulon juga memiliki satu pasar sebagai salah satu tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi di desa tersebut.

## **B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Pangan Sejati**

### **1. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Pangan Sejati**

Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi yang baru dan terbentuk atas dasar disahkannya Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Presiden Indonesia yang ke-7 Joko Widodo berusaha membangun ekonomi lewat pinggiran. Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon merupakan salah satu BUMDes dari sekian banyak BUMDes yang ada di Indonesia. BUMDes ini bergerak memanfaatkan aset-aset desa. Aset desa yang dimiliki oleh BUMDes berupa pengelolaan sampah, wisata bunga celosia, dan pasar desa. BUMDes ini pada awalnya hanya berbentuk paguyuban pembersihan sampah (Perdes Jati Kulon, 2017: 06).

Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut, maka munculah ide gagasan dari Bapak H. Masud selaku Direktur BUMDes Sumber Pangan Sejati melalui msyawarah desa sebagai wujud melembagakan demokrasi dengan memepertemukan BPD, Pemerintah desa, dan kelompok masyarakat untuk membahas cara yang strategis salah satunya adalah dalam mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes pada dasarnya adalah membangun tradisi suatu masyarakat di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi lagi. Dengan berbekal inventarisasi potensi yang di miliki oleh desa, forum musyawarah menggunakan praktik *deliberative democracy* untuk menyepakati

gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset - aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa Jati Kulon mendirikan BUMDes pada tanggal 07 Desember 2017 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam peraturan Desa No 06 Tahun 2017 dengan nama BUMDes Sumber pangan Sejati (Perdes Jati Kulon, 2017: 06)

Adanya potensi yang sangat besar ini, Bapak Sugeng Prasetyo selaku Kepala Desa pada tahun 2017 langsung mempunyai inovasi untuk mendirikan Badan Usaha pengelolaan sampah yang dimana menjadi permasalahan utama desa dikelola menjadi barang yang lebih ekonomi dan mampu untuk meninovasi unit usaha lain seperti taman bunga celosia dan pasar desa. Dalam hal ini pemerintahan desa mengajak kerjasama dan dukungan dengan jajaran pemerintahan desa Jati Kulon pada awalnya. Awal berdirinya BUMDes Sumber pangan sejati ini hanya bergerak di bidang pengelolaan sampah, untuk membersihkan sampah yang ada di desa dipindahkan ke TPS. Sebelum adanya BUMDes desa Jati Kulon juga menjadi desa tematik. Masyarakat desa Jati Kulon semakin meningkatkan tingkat kesejahteraannya karena adanya pengelolaan sampah yang di pandan

sebagai barang yang tidak berguna namun adanya pelatihan di kabupaten maupun propinsi menjadikan masyarakat desa Jati Kulon lebih kreatif dan inovatif untuk membuat karya dari sampah yang akan di jual.

BUMDes desa Jati Kulon yang awalnya hanya mengelola unit bank sampah, seiring dengan berjalannya waktu pada tanggal 1 Agustus 2019 BUMDes Sumber Pangan Sejati desa Jati Kulon semakin berkembang dan menambah unit kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat desa yaitu Taman Bunga Celosia dan Pasar Desa. Sehingga peningkatan pendapatan masyarakat lebih tinggi.

## **2. Visi dan Misi BUMDesa Sumber Pangan Sejati**

Visi BUMDes **Sumber Pangan Sejati** Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat menuju desa yang mandiri.

Misi BUMDes Sumber Pangan Sejati adalah:

- a. Mendorong berkembangnya usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menampung seluruh usaha-usaha kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat;

- c. Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat;
- d. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan;
- e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggungjawaban keuangannya.

**Tabel 3.7**

**Struktur organisasi BUMDes Sumber Pangan Sejati**

NO.	N A M A	JABATAN	UNSUR
.1.	SUGENG PRASETYO	Penasehat	Kepala Desa
	<u>PENGELOLA</u>		
1.	H. MAS'UD	Direktur	Tokoh Masyarakat
2.	Drs. SUWOTO, M.Pd.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	AHMADI, S.Pd.	Bendahara	Tokoh Masyarakat
1.	Drs. H. SUSILO IRIANTO	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	ARDI MUHAYAT	Wakil	Tokoh Masyarakat

	RIDHA	Ketua	
3.	PURWANTA AGUNG S. S.Pd. M.Pd..	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	IMAM WAHYUDI	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	SUKARMAN	Anggota	Tokoh Masyarakat

*Sumber: Anggaran Dasar BUMDes Sumber Pangan Sejati  
2017*

### **3. Sejarah BUMDes Sumber Pangan Sejati**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh lima Oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di gedung Serbaguna Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Perangkat Desa Jati Kulon membahas Rancangan Peraturan Desa Jati Kulon tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebaga berikut “Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jati Kulon Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa”.

Pada hari Rabu tanggal dua puluh lima Oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di gedung Serbaguna Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Perangkat Desa Jati Kulon membahas Rancangan Peraturan Desa Jati Kulon tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pembukaan Rapat dimulai pukul 20.00 WIB dipimpin oleh Ketua BPD
- b. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon oleh ketua BPD.
- c. Pembahasan oleh anggota BPD dilanjutkan mohon penjelasan kepada Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon
- d. Jawaban Kepala Desa atas pertanyaan anggota BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon
- e. Setelah mendapat jawaban dan penjelasan dari Kepala Desa seluruh anggota BPD yang hadir Menyepakati atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian

### Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon

- f. Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 06: 2017, Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kuon).

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [vide Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendes PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang- undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (road map) pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:5 (a) inisiatif usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan

dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

“Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang:

- a. pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa;
- b. penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa; Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDes setempat. Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa yang memuat BUMDes tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif) (wawancara: Bapak Sugeng Prasetyo, 27/11/2019).

### **C. Peran BUMDes Sumber Pangan Sejati Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan dari masing-masing sosial masyarakat yang berkaitan akan menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran (Soerjono, 2002: 243). Terbentuknya BUMDes memberi dampak yang terhadap desa Jati Kulon, karena BUMDes telah memberi kontribusi pada warga Jati Kulon yakni dengan dibukanya lapangan

pekerjaan untuk warga Jati Kulon. Anggota yang bergabung dalam BUMDes sendiri terdiri dari masyarakat desa Jati Kulon. Berikut wawancara dengan bapak Sugeng Prasetyo pada tanggal 17 Juli 2019.

“Saya sebagai pimpinan desa tentu menjadi cambuk untuk kepribadian saya dalam memimpin masyarakat. Dengan memberikan contoh yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Desa Jati Kulon. Dalam pelaksanaannya saya juga sampaikan pada Perangkat Desa agar memberikan pelayanan prima pada masyarakat dalam meminta surat menyurat dan lain sebagainya. dari hal tersebut membuat masyarakat nyaman sehingga memacu masyarakat untuk mengikuti aturan dalam setiap kegiatan atau norma yang berlaku di Desa. Desa Jati Kulon yang sebagian wilayah desa banyak terdapat pabrik dan mengakibatkan banyaknya limbah baik padat, cair dan gas serta limbah rumah tangga karena juga banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sehingga dari situlah limbah atau sampah menumpuk serta tidak ada pengelolaannya. Disisi lain Desa Jati Kulon ini terdapat paguyuban pengumpul sampah. Sehingga muncul inovasi untuk mengumpulkan dan memilah sampah, dari situ muncul inovasi untuk mengadakan pelatihan membuat sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi. Karena pengelolaan sampah tersebut desa Jati Kulon ini menjadi desa yang bersih bahkan menjadi juara kebersihan desa se-Kabupaten Kudus. Desa Jati Kulon juga menjadi desa inovatif yang menjadikan desa Jati Kulon ini sebagai referensi untuk pengelolaan BUMDes dan juga pengelolaan desa.

Karena adanya BUMDes yang bernama Suber Pangan Sejati, banyak juga peningkatan perekonomian masyarakat. Dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan (wawancara dengan Bapak Sugeng Prasetyo, 18/11/2019).

Begitu juga yang dipaparkan oleh bapak Jumaidi dalam wawancaranya pada tanggal 18 /11/ 2019.

“Adanya kegiatan pengelolaan sampah warga desa juga ikut senang, dikarenakan lingkungan desa yang bersih, nyaman, kurangnya penyakit DB. Tidak hanya itu, dengan adanya kegiatan pemilihan sampah juga menambah penghasilan masyarakat, dimana sampah itu bisah untuk dijual seperti; sampah plastik botol, kertas, dan barang yang tidak terpakai. Disisi lainuang yang didapat bisa untuk tambahan biaya sekolah, biaya belanja, bahkan bisa utuk tabungan”.

BUMDes Sumber Pangan Sejati yang ada di desa Jati Kulon juga berperan sebagai motivator masyarakat desa Jati Kulon untuk memanfaatkan masalah menjadi potensi lokal yang dimiliki desa Jati Kulon sebagai sumber untuk meningkatkan ekonomi warga dan kemajuan desa Jati Kulon sendiri. BUMDes ini juga berdampak pada pendapatan warga desa Jati Kulon yang sangat membaik. Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Masud selaku direktur BUMDes Sumber Pangan Sejati dalam wawancara pada tanggal 20/11/2019:

“Pengelolaan sampah yang begitu sulit di seluruh warga masyarakat desa Jati Kulon, karena warga masyarakat memandang bahwa sampah itu tidak biasa untuk digunakan lagi apalagi untuk menambah pendapatan warga. Sebelum adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati yang mengelola sampah, desa Jati Kulon sangat kumuh, sering banjir bahkan menjadi langganan. Bukan hanya itu, banyak masyarakat yang terkena Demam Berdarah (DB). Disamping itu juga, banyak pabrik-pabrik yang berada di wilayah desa Jati Kulon yang limbahnya juga sampai ke desa Jati Kulon. Karena itulah, Perlu adanya sosialisasi turun ke rt” menjelaskan pengelolaan sampah dan juga mengikutsertakan masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan seminar tingkat propinsi dan kabupaten. Sampah akan di kelolaa untuk menjadi barang yang lebih ekonomis. Awalnya pengelolaan sampah ditarik Rp 10.000 per rumah untuk operator pengambilan sampah dan kemudian dinaikan Rp 3000 dan dikalikan perrumah. Utuk operasionalnya sehingga mendapat Rp 18.000.000. saat ini sudah mempunyai kas 40.000.000 untuk operasional dan sisanya untuk diberikan ke setiap rt 720.000 pertahun dari penghasilan pengelolaan sampah. Bukan haya itu,Setiap tahun ada *go green*, kebersihan, *green and clean*, desa hijau sabtu hijau minggu sehat, untuk mengurangi banjir, mengurangi panyakit DB. Karena banyaknya sampah plastik. Bahwa kebersihan dan kesehatan terjaga.

BUMDes Sumber Pangan Sejati juga berperan sebagai jaringan lembaga desa dalam pembangunan sektor wisata, secara tidak langsung BUMDes Sumber Pangan Sejati telah mengangkat potensi yang dimiliki oleh desa Jati Kulon dan memperkenalknanya dalam kancah Propinsi bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai

pemenang kategori Desa terbersih yang diberikan oleh P3MD dalam expo BUMDes 17 November 2019. Dalam hal ini BUMDes tidak bekerja sendiri melainkan menggandeng juga aparatur pemerintah desa, karang taruna, PKK, pokdarwis (kelompok sadar wisata) KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. BUM Desa Jati Kulon didirikan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu :

1. mengembangkan potensi perekonomian di kawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat Desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga;
4. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;
5. menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan dan jaminan sosial masyarakat;
6. memperkuat kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan (Perdes Jati Kulon, 2017: 06)

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

BUMDes Sumber Pangan Sejati juga berperan sebagai fasilitator dalam mengeloa usaha-usaha didesa Jati Kulon untuk memfasiltasi dan memberdayakan usaha ekonomi yahg dikembanekan oleh masyarakat Desa, melidungi kepentingan umum, dan memfasilitasi kegiata pelayanan publik Desa. BUMDes Sumber Pangan sejati sebagai lembaga ekonomi desa merupakan bagian penting dari proses pembangunan desa melalui penguatan ekonomi desa

Jati Kulon. BUMDes Sumber Pangan Sejati pada dasarnya merupakan upaya konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-Lembasa ekonomi perdesaan. sebagai lembaga ekonomi milik desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Jati Kulon (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).

Upaya yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Pangan Sejati untuk memberdayakan masyarakat desa Jati Kulon merupakan hal yang sangat tidak mudah. Ada beberapa tahapan untuk tercapainya sebuah pemberdayaan yang di lalui. Seperti memberikan penyadaran kepada masyarakat desa Jati Kulon tentang lingkungan dan potensi yang dimiliki desa, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk ikut serta bergabung dalam BUMDes.

1. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Desa Jati kulon yang terletak disekitar kawasan industri seringkali tercemari oleh limbah dari pabrik baik kertas, kaca, plastik, karet, besi, baja, tembaga, alumunium dan sampah rumah tangga. Belum lagi pada waktu musim penghujan sering kali masyarakat desa terkena penyakit Demam

Bredara (DB), karena tidak ada pengelolaan terkait limbah yang ada di desa Jati Kulon.

Gambar 3.2: keadaan sebelum adanya pengelolaan sampah



Sumber : Dokumentasi Desa Jati Kulon

“Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin berlimpah pula bertambahnya sampah di lingkungan kita. Persoalan sampah sudah menjadi kendala nasional di setiap permukiman. Hal ini yang menjadi tantangan bagi kami untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah. Berawal dari sini pula kami Pemerintah Desa Jati Kulon tergerak untuk mengelola sampah yang ada di seluruh wilayah Jati Kulon dengan program Bank Sampah. Dengan memanfaatkan sampah rumah tangga inilah kami mengajak segenap warga Jati Kulon untuk berperan aktif dan peduli dengan lingkungan. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih tidak cukup hanya peran dari pemerintah saja, keterlibatan segenap masyarakat sangat diharapkan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat” (wawancara dengan bapak Sugimin, 1/12/2019).

Gambar 3.3: pembersihan lingkungan desa



Sumber: Dokumentasi BUMDesa Jati Kulon

2. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi atau ketahanan terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Sebelum adanya BUMDes keberadaan pengembangan berbasis ekonomi di desa Jati kulon yang ada selama ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor yang mendominasi adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya proses kegiatan pembangunan menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di desa Jati Kulon. Dimana sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan

pemerintah sehingga mematkan semangat kemandirian masyarakat.

“Desa Jati Kulon ini mayoritas masyarakatnya kerja di perusahaan baik perusahaan swasta maupun negara mas, saya dulunya bekerja di pabrik mas. Setelah saya di PHK, saya bekerja serabutan. Hasilnya juga tidak menentu, penghasilan saya pun juga menurun setelah berhenti kerja di pabrik. Adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati saya bisa bekerja kembali sebagai operator pengambilan sampah mas. Hasilnya juga lumayan untuk kehidupan sehari-hari, selain itu juga untuk tambahan uang sekolah anak, tambahan belanja, bisa juga untuk ditabung. Untuk penghasilan saya perbulan di BUMDes Sumber Pangan sejati ini Rp 1.200.000 perbulan. Belum lagi kalau pemilahan sampah bisa lebih dari itu mas” (wawancara dengan bapak Joko Maryoto, selaku operator BUMDes Sumber Pangan Sejati: 20/11/2019).

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan BUMDes desa Jati Kulon berpedoman pada pengakuan terhadap hak asal-usul Desa, kebersamaan kerjasama yang selalu dilandasi dengan semangat untuk berperan aktif, saling menghargai dan saling menguntungkan diantara Desa dan unsur masyarakat Desa. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan dan untuk kepentingan bersama serta

menjalankan usahanya dengan baik dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antar Desa melalui diskusi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat.

Gambar 3.4: muyawarrah masyarakat dan pemerintah desa



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

Partisipasi turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. kesetaraan dan keadilan gender: memberikan ruang kepada wanita untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan serta kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. keberlanjutan: hasil dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa

dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tidak terbatas. transparansi dan akuntabilitas: pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pengambilan keputusan, dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat moral, teknis, legal, maupun administratif (Perdes Jati Kulon, 2017: 06).

3. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Sarana dan prasarana pendukung juga tidak kalah pentingnya demi suksesnya program BUMDes Sumber Pangan Sejati dalam pengelolaan sampah ini, mulai dari tempat sampah, gerobak sampah beserta operatornya juga tempat pembuangan sampah perlu kita fasilitasi demi lancarnya program ini. Ketersediaan alat pendukung juga perlu kita sediakan agar proses dalam pemanfaatan limbah lebih cepat teratasi.

Gambar 3.5: sarana dan prasarana BUMDes Jati Kulon



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

“BUMDes Sumber Pangan Sejati ini sudah ada perkembangan mas, sekarang sudah ada alat untuk pengangkutan sampah. Ada tujuh armada untuk mengangkut sampah yang di buang di tempat pembuangan sementara (TPS). Selain itu juga ada sumbangan dari pemerintah kabupaten Kudus yang di berikan langsung oleh bapak H. Mustofa selaku bupati Kudus mas pada tahun 2018 kemqrin mas. Selain bantuan armada BUMDes Sumber Pangan Sejati juga menerima sumbangan dari propinsi dan kabupaten diantaranya alat pengepresan sampah, tmbangan, alat pencacah sampah, dan komposter serta tempat sampah untuk masyarakat desa Jati Kulon. Pemberian itu semua untuk kebutuhan masyarakat Jati Kulon sebagai penunjang proses pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya itu untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung BUMDes juga di berikan dari pemerintah Kabupaten Kudus dengan anggaran Rp 416.475.500-. semua itu tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan desa Jati Kulon dapat berperan dan

berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Sumber Pangan Sejati (wawancara dengan bapak H. Masud selaku direktur BUMDes Sumber Pangan Sejati, 1/12/2019).

4. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Gambar 3.6: lomba pengolahan sampah antar RW



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

“Program pengelolaan sampah adalah sarana bagi Pemerintah Desa Jati Kulon untuk mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Untuk mewujudkan impian tersebut dibutuhkan peran serta semua warga Jati Kulon. Peran serta dan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan desa yang bebas dari sampah dan memaksimalkan manfaat sampah. Program pengelolaan sampah menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi bagi warga Jati Kulon. Semua warga harus berperan aktif dan mensukseskan program pengelolaan sampah ini dengan penuh ikhlas

dan tanggung jawab demi terwujudnya desa yang bersih dan sehat”(wawancara: dengan bapak Sugeng Prasetyo selaku kepala desa, 01/12/2019).

a. Peran Masyarakat Desa Jati Kulon

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa Jati Kulon. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak menyampaikan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan serta akses dan kontrol terhadap sumber daya (Nyoman, 2016: 11).

Perencanaan pembangunan desa Jati Kulon mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat desa Jati kulon dalam pengambilan keputusan, termasuk kelompok miskin dan rentan di antaranya anak-anak, perempuan, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Masyarakat desa Jati kulon juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa Jati Kulon.

b. Peran Pemerintah Desa Jati Kulon

pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunannya sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa Jati Kulon dengan melibatkan seluruh masyarakat desa Jati Kulon dengan semangat gotong royong.

BPD bertanggung jawab menyelenggarakan musyawarah desa Jati Kulon. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca-musyawarah:

- 1) Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompokkelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat Jati Kulon secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat Jati Kulon juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan musyawarah desa Jati Kulon.

- 2) Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa Jati Kulon.
  - 3) Tahap pasca-musyawarah desa, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan musyawarah dan rekomendasi kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintahan desajati Kulon (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).
- c. Peran Pemerintah Daerah

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa pemerintah desa dalam rangka penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam mengoordinasikan pembangunan desa Jati Kulon, kepala desa Jati Kulon dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya kecamatan Jati.

d. Penasihat BUMDes

Dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa, artinya tidak diperlukan penetapan atau pengangkatan, secara otomatis dijabat oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Des.

- 1) Kewajiban Penasihat sebagai berikut :
  - a) Memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
  - b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Desa.
  - c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- 2) Kewenangan Penasihat sebagai berikut :
  - 1) Meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.
  - 2) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).

e. Direktur BUMDes

Bertugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Direktur merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa, tidak boleh merangkap dengan jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

1) Kewajiban Direktur BUMDes, sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat desa.
- b) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Des.
- c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

2) Kewenangan Direktur BUMDes, sebagai berikut :

- a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit BUMDes setiap bulan.
  - b) Membuat laporan perkembangan seluruh unit-unit BUMDes setiap bulan.
  - c) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit BUMDes kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).
- f. Pengawas BUMDes

Bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus dan bertugas mengawasi kebijakan Direktur dalam menjalankan organisasi BUMDes, yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa.

- 1) Tugas Pengawas BUMDes, sebagai berikut:
  - a) Mengawasi dan memberikan masukan kepada Penasehat dan Direktur BUM Desa dalam menjalankan BUMDes.
  - b) Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes.

- c) Memantau dan mengevaluasi kinerja Direktur dan Pengelola Unit BUMDes.
  - d) Mengkaji pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan BUMDes.
  - e) Memantau kepatuhan BUMDes terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).
- 2) Kewajiban Pengawas BUMDes, sebagai berikut:
- a) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Musyawarah BUMDes Pertanggungjawaban mengenai Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes yang diusulkan Direktur BUMDes.
  - b) Memberikan pendapat kepada Musyawarah BUMDes Pertanggungjawaban mengenai masalah strategis atau dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi BUMDes.

- c) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direktur BUMDes.
  - d) Menandatangani Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dan Laporan Tahunan BUMDes.
  - e) Menyelenggarakan Musyawarah BUMDes Pertanggungjawaban untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).
- 3) Kewenangan Pengawas BUMDesa, sebagai berikut :
- a) Pemilihan kepengurusan pengawas. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa.
  - b) Pelaksana pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direktur BUMDesa.
  - c) Mengusulkan Auditor Eksternal jika dibutuhkan untuk disahkan dalam Musyawarah BUMDesa Pertanggungjawaban dan memantau penugasan Auditor Eksternal.

- d) Menyusun pembagian tugas diantara anggota Pengawas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Pengawas.
  - e) Menyusun program kerja dan target kinerja Pengawas tiap tahun.
  - f) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Pengawas kepada Masyarakat.
  - g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawas kepada Musyawarah BUM Desa Pertanggungjawaban (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).
5. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik.

Gambar 3.7: hasil pengolahan sampah



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

“Program pengelolaan sampah ini sudah terbukti efektif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, selain bisa menambah sumber pendapatan bagi setiap warga Jati Kulon, juga menyerap tenaga kerja untuk pengelolaan sampah. Dalam kegiatan pengelolaan ini diantaranya:

- Sampah di setiap rumah warga Jati Kulon di pungut oleh operator maksimal 2 hari sekali.
- Setiap hari 2 kontainer sampah di angkut ke TPA oleh PKPLH
- setiap hari Sabtu warga menjual hasil sampah yang dipilah ke bank sampah.
- Setiap hari Minggu pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas.
- Mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kemampuan dalam pemanfaatan barang bekas” (wawancara: dengan bapak Sugeng Prasetyo selaku kepala desa Jati Kulon, 01/12/2019)

Pengalokasian hasil usaha BUMDes Sumber Pangan SeJati

- a. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- b. Hasil usaha yang dimaksudkan pada ayat (1), menjadi Pendapatan Asli Desa dan tercantum dalam dokumen keuangan APB Desa.
- c. Pembagian hasil dari usaha BUM Desa ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum dan/atau kesepakatan dalam Kerjasama BUM Desa Antar-Desa dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa Antar-Desa.
- d. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui system Standar Akuntansi sederhana

Perincian Alokasi Hasil Usaha BUMDesa Sumber Pangan Sejati sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Desasebesar = 30%
- b. Penambahan modal sebesar = 40%
- c. Pengembangan Kelembagaan BUMDesa sebesar = 10%
- d. Dana sosial sebesar = 10%
- e. Pendanaan Kepengurusan BUMDesa sebesar = 10%
- f. Jumlah = 100%

Bila BUMDesa Sumber Pangan Sejati belum mempunyai keuntungan berjalan, maka pendanaan BUMDesa dan Pengawas untuk sementara disubsidi dari modal awal BUMDesa yang di masukkan sebagai biaya non operasional BUMDesa Sumber Pangan Sejati (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).

Hasil usaha BUMDesa Sumber Pangan Sejati merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Pembagian Hasil usaha BUMDesa Sumber Pangan Sejati sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Sumber Pangan Sejati (Perdes Jati Kulon tentang BUMDes, 2017:06).

6. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa Jati Kulon, meliputi:
  - a. Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB Desa dengan memanfaatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
  - b. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis melalui :
    - 1) kerjasama antar desa
    - 2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa ;
    - 3) kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial, ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor.
  - c. Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa di wilayah Kecamatan Jati dengan pola kerjasama antar Desa melalui usaha bersama dengan cara

- penyertaan modal bersama Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- d. Melakukan diversifikasi usaha BUM Desa melalui Badan Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di wilayah Kecamatan Jati dengan membentuk Badan Hukum Unit Usaha Bersama BUM Desa, yang melakukan usaha dan/atau bisnis keuangan (financial business) melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dan usaha bersama (holding) (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).
  - e. Melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUM Desa secara profesional dan berkelanjutan.

Gambar 3.8: gedung BUMDes Sumber Pangan Sejati



Sumber: Dokumentasi Observasi

Untuk meningkatkan ekonomi rakyat, pada tahun 2017 Desa Jati Kulon mencanangkan kampung tematik, dengan tema “1001 inovasi”. Adapun tema-tema tersebut berbeda-beda pada setiap RW, diantaranya

RW 1, Kampung Padang Bulan. Dinamakan kampung padang bulan, karena wilayah itu disepanjang jalan terdapat berbagai jenis lampion. Jalannya juga diberi warna-warni, sehingga enak untuk jagong bareng. Selanjutnya setiap malam minggu mengadakan *car free night*, banyak pengunjung dari luar RT dan luar desa, mereka sambil menyantap makanan khas tempo dulu pada waktu terang bulan.

Gambar 3.9: *Car Free Ningt* masyarakat desa



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

RW 2, Kampung Homestay. Dinamakan Kampung Homestay, dikarenakan wilayah tersebut masyarakatnya banyak yang membuka usaha rumah penginapan atau kost-kostan. Pengurus RW memasarkan dan

mengenalkan bahwa Homestay yang ada di wilayah ini tidak kalah dengan hotel-hotel yang ada di kabupaten Kudus. Masih di RW 2, ada potensi tentang proses pengoplosan serta daur ulang sampah serta kebersihan dan keindahan lingkungan, yang diberi tema “Bunga Citra Lestari alias Kampung BCL”. Sebagai kampung BCL, mempunyai makna predikat citra kebersihan lingkungan dan taman. Selain penataan lingkungan yang bagus dan menarik, warga setempat juga akan membudidayakan tanaman obat-obatan yang langka untuk dikonsumsi sendiri dan bisa dijual belikan.

RW 3, Kampung Kuliner. Warga wilayah RW tersebut mempunyai berbagai macam masakan serta mempunyai toko-toko atau warung kuliner yang sangat banyak. Sehingga masyarakat bisa memilih masakan yang diinginkan sesuai selera. Selain Kampung Kuliner, di RW 3 ini juga mendapat julukan lain, yaitu Kampung Pintar, karena terdapat pusat pembelajaran yaitu perpustakaan desa, dengan nama “MELATI”. Perpustakaan Melati menyediakan berbagai macam buku, baik diakses melalui manual atau via online.

RW 4, Kampung Industri. Dinamakan kampung industri, lantaran di wilayah tersebut terdapat industri tingkat atas, menengah ataupun tingkat rumahan. Terdapat Industri Kertas PT. Pura, Industri Rokok PT. Djarum, Industri Es, Konveksi, Besi dan lain-lain. Selain itu RW 4 juga identik dengan Kampung Markisa, karena di wilayah

tersebut banyak tanaman buah markisa, yang buahnya diolah menjadi Sirup dipasarkan, sehingga wilayah ini mendapat pemasukan dari hasil buah markisa.

RW 5, Kampung Tempean. Dinamakan kampung tempean, karena masyarakat di wilayah itu kebanyakan mempunyai usaha pembuatan TEMPE. Dari hasil pengolahan tempe tersebut didistribusikan ke berbagai wilayah terutama Kudus dan Demak. Kedepan ada harapan untuk pengembangan keripik tempe, botok tempe, dan limbah tempe akan digunakan sebagai pengganti LPG untuk keperluan memasak rumah tangga. Selain kampung tempean, RW 5 juga memiliki julukan lain yakni Kampung ASI (Air Susu Ibu), kampung ini dijadikan sebagai percontohan agar ibu-ibu se Desa Jati Kulon, jika mempunyai anak, maka putra-putrinya umur 0-2 tahun, wajib memberikan ASI.

RW 6, Kampung Agro. Dinamakan Kampung Agro, karena wilayah tersebut, sudah tertata lapak-lapak penjual buah, hasil pertanian warga setempat, seperti Melon, Semangka, Tomat. Pembeli bisa membeli dengan memetik sendiri di sawah. Di sini juga sebagai Destinasi Wisata Bunga Celosia yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bupati Kudus. Pemerintah desa Jati Kulon telah menyediakan beberapa lapangan pekerjaan untuk masyarakat pada BUMDes “Sumber Pangan Sejati”. (Wawancara: Sugeng Prasetyo selaku kepala desa Jati Kulon, 30/11/2019).

Gambar 3.10: Taman bunga Celosia



Sumber: Dokumentasi Observasi

7. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Gambar 3.11: kerjasama dan studi banding antar desa



Sumber: Dokumentasi Observasi

Jenis usaha BUM Desa dapat dilakukan dengan mendirikan Unit-Unit Usaha BUM Desa dan/atau dengan melakukan penyertaan modal ke dalam Unit Usaha Bersama Kerjasama BUM Desa Antar Desa / Kelurahan

- a) Jenis Usaha BUM Desa menjalankan usaha dibidang Jasa yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, antara lain :
1. Jasa Pengelolaan Sampah
  2. Jasa Pengelolaan Bank Sampah
  3. Jasa Pengelolaan Pamsimas

4. Jasa Pengelolaan Badan Kredit Desa (BKD).
  5. Pasar Desa
  6. Wisata Taman Bunga Closia
- b) Jenis Usaha BUM Desa yang menjalankan Usaha dibidang Produksi dan Pemasaran, antara lain :
1. Hasil Pertanian tanaman pangan dan Perkebunan
  2. Kerajinan dan usaha rumahan
- c) Jenis Usaha BUM Desa yang menjalankan usaha dibidang Pariwisata yaitu Wisata Kuliner yang berada di pusat kuliner Sempalan Indah (Perdes Jati Kulon tentang BUMDes, 2017: 06)

“Dari perencanaan BUMDes yang dimusyawarakhan melalui musdes, seiring dengan berjalannya waktu BUMDes Sumber Pangan Sejati terdapat trobosan baru untuk pengembanya ekonomi masyarakat. Dengan adanya potensi lokal yakni hasil pertanian warga setempat, seperti Melon, Semangka, Tomat. Pembeli bisa membeli dengan memetik sendiri di sawah selain itu, banyaknya kuliner di kabupaten Kudus banyak kuliner. Dari potesi lokal itulah maka BUMDes Sumber Pangan Sejati mengadakan pasar desa untuk kegiatan perekonomian masyarakat desa Jati kulon. Didekat pasar desa terdapat lahan bengkok desa yang berdampingan sekaligus menjadi trobosan untuk membuka taman

wisata Bunga Celosiayang pada tanggal 11 September 2019 telah diresmikan oleh Bupati Kudus (wawancara: dengan bapak H.Masud selaku direktur BUMdes Sumber Pangan Sejati, 01/12/2019).

Peningkatan ekonomi masyarakat juga dirasakan oleh warga desa Jati Kulon dimana dengan adanya pasar desa dirasakan Ibu Ika dalam wawancara 01/12/2019.

Gambar 3.12: pasar desa Jati Kulon



Sumber: Dokumentasi Observasi

“Dengan dibukanya pasar desa pendapatan semakin bertambah mas. Yang awalnya rata-rata penghasilan saya Rp 750.000, sekarang meningkat menjadi Rp 1.200.000. apalagi kalau liburan penghasilan saya bisa mencapai kurang lebih Rp 2.000.000. selain itu juga desa jati Kulon ini banyak yang menjadikan studi banding

dari desa lain, banyak yang membawa oleh-oleh dari desa ini mas. Hal ini juga dirasakan oleh pedagang lainnya”.

Hal itu juga tidak jauh beda dengan pendapat Ibu Tutik pada wawancara 01/12/2019.

“Adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati mas ada perubahan peningkatan penghasilan saya, dari pemilahan sampah yang tidak terpakai saya daur ulang lagi. Seperti sampah plasti saya buat kreasi bunga dan saya jual laku mas. Dari sepatu yang rusak tidak di pakai, saya kreasikan dari hasil pelatihan yang diadakan BUMDes Sumber Pangan Sejati. Harganya bisa 2X lipat mas. Saya juga menjualnya waktu ada studi banding dari desa lain, bahkan saya jual online juga mas. Banyak juga yang minat untuk membelinya. Sehingga tidak sedikit pula penghasilan yang saya dapat dari adanya kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati.

Adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati peningkatan perekonomian juga dirasalan oleh bapak Sutris selaku operator BUMDes Sumber Pangan Sejati Pada wawancara 02/12/2019.

“Saya dulunya kerja serabutan mas, seadanya pekerjaan saya kerjakan mas untuk biaya keluarga mas. Sebelum adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati penghasilan saya tidak menentu mas, sesudah adanya BUMDes ini

pendapatan saya semakin bertambah mas per bulan saya bisa dapat dari BUMDes Rp 1.200.000. Pada hari libur pendapatan saya bisa naik Rp 300.000 – 600.000 mas, karena banyak pengujung di pasar desa untuk pembersihan lokasi saya bisa memila-milah sampah dimana hasil pemilahan sampah itu bisa saya tabungkan mas. Untuk biaya pendidikan anak, untuk tambahan uang belanja keluarga dan juga untuk modal usaha mas.

Pendapat yang senada juga diutarakan oleh bapak Sugeng Prasetyo selaku kepala desa Jati Kulon Pada wawancara 03/12/2019.

“Adanya BUMdes ini mas untuk peningkatan pendapatan desa mas. bagi Pemerintah Desa Jati Kulon untuk mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Untuk mewujudkan impian tersebut itu mas, dibutuhkan peran serta semua warga Jati Kulon. Peran serta dan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan desa yang bebas dari sampah dan memaksimalkan manfaat sampah. Selain itu juga memanfaatkan dengan maksimal sampah yang ada menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga. Disisi lain juga adanya pasar desa dan tama bunga celosia. Sebagai penunjang roda perekonomian masyarakat desa Jati kulon mas. Hal itu, menjadi trobosan bagi desa Jati Kulon untuk meningkatkan ekonomi melalui 1001 inovasi di desa Jati Kulon mas. Sehingga banyak dri desa

lain yang menjadikan desa Jati kulon sebagai referensi untuk penglolan desan terutama BUMDes.

Secara umum tujuan dari Anggaran Dasar (AD) BUMDes Sumber Pangan Sejati Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah

1. Meningkatkan perekonomian desa Jati Kulon.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa Jati Kulon.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa Jati Kulon.
4. Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dana atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga Jati Kulon.
6. Membuka lapangan kerja untuk msyarakat desa Jati Kulon.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa Jati Kulon.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa Jati Kulon (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).

#### **D. Hasil BUMDes Sumber Pangan Sejati Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil yang terjadi pada masyarakat merupakan akhir dari sebuah kegiatan yang dilakukakn oleh masyarakat tersebut. Yang merupakan hasil dari sebuah proses pelaksanaan panjang. Dan merupakan sebuah hasil akhir dari proses pelaksanaan pemberdayaan dimana masyarakat sangat berantusias terhadap pemberdayaan melalui peranan BUMDes Sumber Pangan Sejati desa jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Adanya pemberdayaan yang terselenggara diharapkan bisa memberikan hasil yang positif dan kesejahteraan bagi masyarakat desa Jati Kulon. Hasil dari penyelenggaraan lebih berfokus pada kemandirian masyarakat dan masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mereka bisa mandiri. Desa Jati Kulon merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDes yang sangat maju dan mempunyai banyak usaha untuk memberdayakan masyarakat desa Jati Kulon serta mendapatkan pendapatan desa yang sangat tinggi. Sehingga mampu untuk memberdayakan masyarakat desa Jati Kulon.

Hasil dari sebuah pemberdayaan itu tidak hanya dilihat dari satu segi saja melainkan bisa dilihat dari segi ekonomi, sosial, lingkungan masyarakat desa Jati Kulon.

#### 1. Hasil Ekonomi

Sebelum adanya pemberdayaan oleh BUMDes Sumber Pangan Sejati pendapatan masyarakat desa Jati Kulon belum ada pengelolaan taekait dengan aset yang dimiliki desa, potensi yang ada di desa. Pekerjaan masyarakat yang sebagian bekerja petani dan serabutan yang pendapatannya tidak menentu, bahkan juga banyak yang tidak bekerja (pengangguran). Untuk keperluan rumah tangga sehari-hari seperti pangan, sandang, listrik, biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Dari data perkembangan kependudukan terkait dengan ekonomi masyarakat desa Jati Kulon tercatat :

Tabel 3.8

#### Persentasi Kependudukan dengan ekonomi

No	Ankatan penduduk usia 18-56 tahun	kerja	jumlah	Presentase %
1	Masih sekolah dan tidak bekerja		360	4
2	Menjadi ibu rumah tangga		250	3

3	Bekerja penuh	3.326	40
4	Bekerja tidak tentu	4.004	49
5	Cacat dan tidak bekerja	5	0,000608
6	Cacat dan bekerja	3	0,000365
7	pengangguran	277	3
	Total	8.225	100

*Sumber: Dokumen Perkembangan Desa Jati kulon  
2016.*

Dari tabel 3.8 data diatas bisa dilihat sebelum adanya BUMDes Suber Pangan Sejati masyarakat masih banyak yang bekerja dengan penghasilan tidak menentu, yang mencapai angka 49% dan pengangguran mencapai 3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian warga masyarakat masih membutuhkan lowongan pekerjaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa Jati Kulon.

Tabel 3.9

Persentasi Kependudukan dengan ekonomi

No	Ankatan kerja penduduk usia 18-56 tahun	jumlah	Presentase %
1	Masih sekolah dan tidak bekerja	347	4

2	Menjadi ibu rumah tangga	185	2
3	Bekerja penuh	3.609	45
4	Bekerja tidak tentu	3.804	46
5	Cacat dan tidak bekerja	2	0,000243
6	Cacat dan bekerja	6	0,00073
7	pengangguran	196	2
	Total	8.225	100

*Sumber: Dokumen Perkembangan Desa Jati kulon 2018*

Seiring dengan pendirian BUMDes Sumber Pangan Sejati masyarakat desa Jati Kulon. Dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa masyarakat desa Jati Kulon mengalami peningkatan pendapatan dari penghasilan tidak menentu, yang mencapai angka 49% sebelum adanya BUMDes dan setelah adanya BUMDes sudah berkurang menjadi 46% tingkat pengangguran yang dari data 3% sesudah adanya BUMDes sekarang sudah berkurang menjadi 2%. Warga masyarakat yang penghasilannya tidak lebih dari Rp 1.000.000,- per bulan Dengan adanya kegiatan Banksampah, Pasar Desa, taman Bunga Celosia pendapatan masyarakat

bisa mencapai Rp 1.200.00,- per bulan bahkan waktu liburan bisa lebih.

Adanya BUMDes Sumber pangan Sejati ini, dengan dukungan dan peran dari semua elemen masyarakat desa Jati Kulon serta partisipasi aktifnya masyarakat desa Jati Kulon. Dimana dengan adanya kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati masyarakat desa Jati Kulon dapat mengembangkan dirinya lebih mandiri, inovatif dan kreatif. Perkembangan BUMDes Jati Kulon ini juga menari dan memotivasi desa-desa lain untuk dijadikan referensi peningkatan ekonomi desa. Pengelolaannya yang baik mejadikan desa ini sering mendapat juara ditingkat kabupaten maupun propinsi diantaranya juara 3 tingkat propinsi lomba bersih dan sehat (LBS) tanggal 17 november dan juara 1 tingkat kabupaten lomba program yang diadakan pada tanggal 30 november 2019.

Gambar 3.13: lomba bersih dan sehat tingkat propinsi



Sumber: Dokumentasi Desa Jati Kulon

Dari pemerintah kabupaten memberikan anggaran dana untuk desa Jati kulon yang diberikan oleh Bapak H. Mustofa selaku Bupati Kudus sejumlah RP 416.475.500- untuk pengelolaan dan pengembangan BUMDes Sumber Pangan sejati yang dapat dilihat pada gambar 3.14.

Gambar 3.14: pemberian anggaran dana dari pemerintah kabupaten Kudus



Sumber: Dokumentasi Observasi

“Alhamdulillah mas dengan adanya BUMDes membukakan lapangan pekerjaan untuk saya, saya bisa berjualan di pasar desa penghasilan saya dapat saya gunakan untuk tambahan uang belanja, bayar listrik, uang sekolah anak dan lain-lain mas. Selain itu, Pasar Desa ini juga dekat dengan Taman Bunga Celosia yang menjadi destinasi wisata di desa Jati Kulon ini mas. Waktu hari libur pendapatan saya bisa bertambah mas yang rata-rata perharinya Rp 100.000, waktu hari libur bisa mencapai Rp 200.00 bahkan lebih mas dan seringkali ada studi banding dari desa

lain menjadi tambahan pendapatan saya mas”  
(wawancara: Ibu Eka, 03/12/2019).

Begitu pula yang dikatakan oleh Trisno tanggal  
03/12/2019

“Pendapatan saya ada penambahan mas dengan adanya kegiatan pemilihan sampah yang ada di bank sampah, pasar desa. Dengan adanya kegiatan itu saya bisa menabung di bank sampah setiap bulannya mas pendatan tambahan saya rata-rata Rp 300.000 – Rp 600.000 mas. Lumayan untuk tambahan uang sekolah anak saya, selain itu utuk tambhan modal mas”.

lain pula dengan yang dipaparkanoleh mbak Ika tanggal  
03/12/2019

“saya kerja di BUMDes ini juga baru mas, saya habis lulus SMA langsung di panggil untuk ikut bergabung disini, ya lumayanlah mbak, buat menambah pengalaman. Yang kerja di sini kan tidak ibu-ibu atau orang tua saja tetapi yang mau bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kan mereka mempunyai pendapatan sendiri”.

Dari keterangan diatas bisa disimpulkam, bahwa masyarakat desa Jati Kulon setelah adanya pemberdayaan menjadi lebih baik mereka bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari

pemberdayaan yang telah dirintis oleh BUMDes Sumber Pangan Sejati.

## 2. Segi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber maka dapat di analisis perubahan dari aspek sosial yang dirasakan meliputi perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, Meningkatkan gotong royong dalam pembangunan taman bunga celosia dan pasar desa. Saling berdiskusi dalam mencari inovasi pembuatan karya baru, semakin intensnya pertemuan-pertemuan warga disetiap RW dalam rangka memajukan kegiatannya. Selain itu gotong royong juga dilakukan dalam membersihkan sungai dan pembuatan resapan air desa.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Dimana masyarakat desa Jati Kulon yang setelah diadakannya pelatihan tentang pengelolaan sampah,

masyarakat desa Jati Kulon bertambah pengetahuannya dan wawasannya untuk mengolah sampah yang dianggap banyak orang tidak berguna. Dirubah dan diolah dengan keterampilan untuk dijadikan barang yang lebih bernilai ekonomi. Barang yang diolah diantaranya: pembuatan sepatu dari sepatu yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi, pembuatan tas dari bungkus kopi, pembuatan rantang aqua, pembuaran bunga dari plastik dan lain sebagainya.

Gambar 3.15: pembuatan kreasi dari sampah



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Dimana masyarakat desa Jati Kulon yang ber partisipasi aktif

dalam kegiatan yang diadakan BUMDes Sumber Pangan Sejati seperti: membersihkan lingkungan desa Jati Kulon yang diikuti semua warga desa untuk kenyamanan desa yang dirasakan semua masyarakat desa Jati Kulon. Bahkan menjadi destinasi wisata di desa Jati Kulon.

Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Dimana masyarakat yang menyepakati peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dimana masyarakat yang membuang sampah sebarang didenda Rp 10.000 untuk pengembangan BUMDes. Yang dimana dedan yang diterapkan, untuk membuat warga desa Jati Kulon sadar akan kebersihan lingkungan.

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Wahjudin, 2016: 115). Pemerintah desa Jati Kulon menyadari bahwa keikutsertaan masyarakat desa Jati Kulon dalam membantu memberdayakan masyarakat adalah

bersifat penting. Yang mana hal tersebut akan menjadi keberhasilan BUMDes dalam memberdayakan warga desa.

Program-program dari BUMDes itu sendiri adalah Kampung Padang Bulan. Dinamakan kampung padang bulan, karena wilayah itu disepanjang jalan terdapat berbagai jenis lampion. Jalannya juga diberi warna-warni, sehingga enak untuk jagong bareng. Selanjutnya setiap malam minggu mengadakan *car free night*, banyak pengunjung dari luar RT dan luar desa, mereka sambil menyantap makanan khas tempo dulu pada waktu terang bulan. Kampung Agro. Dinamakan Kampung Agro, karena wilayah tersebut, sudah tertata lapak-lapak penjual buah, hasil pertanian warga setempat, seperti Melon, Semangka, Tomat. Pembeli bisa membeli dengan memetik sendiri di sawah. Di sini juga sebagai Destinasi Wisata Bunga Celosia. Kampung Pintar, karena terdapat pusat pembelajaran yaitu perpustakaan desa, dengan nama "MELATI". Perpustakaan Melati menyediakan berbagai macam buku, baik diakses melalui manual atau via online. potensi tentang proses pengoplosan

serta daur ulang sampah serta kebersihan dan keindahan lingkungan.

“Kampong Pandang Bulan ini mas, sering kali dikunjungi oleh warga dari RT lain bahkan dari luar desa. Diwilayah sepanjang jalan ini terdapat berbagai jenis lampion mas, jalannya juga berwarna-warni enak buat foto-foto dan diskusi mas. Dulu sebelum ada pengelolaan daerah sini kotor, kumuh dan bau mas. Karena tempatnya dekat dengan sungai, tempatnya juga tidak sebagus ini mas. Tapi setelah di adakan pengelolaan tempat ini bersih dan nyaman mas, bahkan setiap malam minggu desa ini mengadakan *car free night*. Say juga berjualan makanan khas tempo dulu pada waktu terang bulan mas”. (wawancara dengan bapak Joko, 03/12/2019).

Hal itu juga dikatakan oleh Maryoto 28/11/2019 sebagai berikut

“Sering sekali mas desa ini mengadakan kegiatan BUMdes yang diikuti hampir semua warga desa mas. Apalgi kalo ada pelatihan yang diadakan oleh kabupaten maupun propinsi warga sini ber antusias sekali untuk mengikuti kegiatan tersebut mas. Karena warga disini sudah merasakan hasilnya mas, sehingga mereka termotivasi untuk membuat karya-karya dari kegiatan BUMDes. Sehingga warga desa ini bisa menjual hasil karyanya di pasar, di expo seperti yang diadakan di alun-alun kodus, bahkan warga

sini termasuk saya dapat menjualnya di via *online*”.

Seperti yang diungkapkan dengan Ibu Atik 01/12/2019 sebagai berikut:

“Hampi Setiap setiap bulan saya mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan mas. Dari BUMDes sendiri sering mengadakan pelatihan yang bekerjasama dengan kabupaten dan propinsi mas. Pelatihan yang diadakan diantaranya adalah membuat tas dari bungkus kopi, mebuat boneka dari kain bekas yang sudah tidak terpakai, mendaur ulang sepatu yang sudah tidak terpakai, membuat tempat aqua, membuat figura. Setelah adanya pelatihan saya pratikan di rumah mas, saya membuat sendiri dan alhamdulillah saya jual laku mas. Bahkan bayak permintaan untuk pembuatannya seperti yang paling banyak sepatu dan tas mas. Harganya sekitar Rp 75.000-300.000, saya juga menjualnya secara *online* mas. Lumayan mas untuk tambahan uang kuliah anak saya dan tambahan belanja”

Kemauan masyarakat yang tinggi ini haruslah ditarik lebih dalam agar mau dan bersedia dalam mengambil andil kegiatan program-program pemberdayaan. Sehingga kegiatan pemberdayaan itu nanti ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara signifikan.

### 3. Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang sangat identik dengan sebuah desa atas tempat tinggal seseorang. Jika suatu lingkungan desa itu bersih maka warag yang menempati juga akan terjaga kesehatannya. Akan tetapi beda lagi kalau dadri warganya sendiri yang tidak bisa hidup bersih jagankan ingin sehat, pasti penyakit juga akan menyerang mereka. Selain itu juga membuat desa akan terlihat kumuh dan kotor tidak terawat. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang menfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya, yaitu dari aspek intelektual (sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai pada aspek manajeriala (Wahyudin, 2016: 112) .

Berdasarkan musyawarah desa, warga mulai mengikuti program bersih desa. yang tujuanya adalah untuk membagun desa agar tidak kumuh dan banyak sampah yang tersebar dimana-mana. Warga mulai sadar untuk membersihkan desanya agar terlihat indah juga agar tidak menjadi kumuh karena banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa

Jati Kulon. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin berlimpah pula bertambahnya sampah di lingkungan. Persoalan sampah sudah menjadi kendala nasional di setiap permukiman. Hal ini yang menjadi tantangan bagi kami untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah. Berawal dari sini pula kami Pemerintah Desa Jati Kulon tergerak untuk mengelola sampah yang ada di seluruh wilayah Jati Kulon dengan program Bank Sampah. Program pengelolaan sampah adalah sarana bagi Pemerintah Desa Jati Kulon untuk mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Untuk mewujudkan impian tersebut dibutuhkan peran serta semua warga Jati Kulon. Peran serta dan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan desa yang bebas dari sampah dan memaksimalkan manfaat sampah.

Gambar 3.16: kegiatan bersih desa



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

“Program pengelolaan sampah menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi bagi warga Jati Kulon. Semua warga harus berperan aktif dan mensukseskan program pengelolaan sampah ini dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab demi terwujudnya desa yang bersih dan sehat. Tujuan dari program pengelolaan sampah ini sudah menjadi tekad bulat bagi Pemerintah Desa Jati Kulon untuk mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Selain itu juga memanfaatkan dengan maksimal sampah yang ada menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga. pengelolaan sampah ini sudah terbukti efektif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, selain bisa menambah sumber pendapatan bagi setiap warga Jati Kulon, juga menyerap tenaga kerja untuk pengelolaan sampah”(wawancara

bapak Sugeng Prasetyo selaku kepala desa Jati Kulon, 01/12/2019).

“Sebelum adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati yang mengelola sampah, desa Jati Kulon sangat kumuh, sering banjir bahkan menjadi langganan. Tetapi mas skarang sudah ada pengelolaannya warga juga berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya. Karena dari pihak BUMDes mensosialisasikan terkait dengan kesadaran masyarakat untuk penglolaan sampah. Sekarang desa Jati kulon sudah tidak kumuh seperti dulu, penyakit DB pun sudah berkurang. Belum lagi keindahan lingkungan, yang diberi tema “Bunga Citra Lestari alias Kampung BCL”. Sebagai kampung BCL, mempunyai makna predikat citra kebersihan lingkungan dan taman. Selain penataan lingkungan yang bagus dan menarik, warga setempat juga akan membudidayakan tanaman obat-obatan yang langka untuk dikonsumsi sendiri dan bisa dijual belikan. Terwujudnya Desa Jati Kulon yang semakin bersih dan sehat, bebas dari sampah, dan bencana banjir” (wawancara dengan bapak Susilo Irianto selaku ketua pengawas BUMDes, 02/12/2019).

Dijelaskan bahwa lingkungan desa Jati Kulon setelah adanya tempat pengelolaan sampah yang didirikan BUMDes banyak perubahan. Desa tersebut menjadi desa yang bersih dan sehat. Jumlah penduduk 8.321 orang Jumlah penabung sampah : 80 orang Jumlah timbulan sampah : 3.328 kg/hari Pemilahan

di Bank Sampah : 100 kg/hari  
Penyetoran di Bank Sampah : 150 kg/hari  
Pengomposan : 25 kg/hari  
Jumlah pengurangan sampah : 8,2 % perhari. Warga desa Jati Kulon bisa menikmati keindahan-keindahan yang dimiliki desa Jati Kulon itu sendiri. Selain itu warga desa Jati Kulon bisa menghirup kesehatan dengan lingkungan yang dimilikinya.

“Kalau lingkungan ya bersih iya mas, akan tetapi kita mempunyai kekurangan dalam hal tempat parkir buat wisatawan Taman Bunga Celosia yang ingin berkunjung di Jati Kulon, pengujung waktu hari libur juga tidak sedikit mas sampai operator bank sampah kuwalahan untuk pengambilan sampah. Apalagi armada yang ada masih di ayun mas belum berupa mesin. Armada seperti ini juga sedikit menghambat untuk pengambilan sampah, dengan armada ini pengambilan sampah lumayan lama mas. Harapan saya ditambah lagi armada yang bermesin mas, untuk pengambilan sampah biar lebih cepat”(wawancara dengan bapak Sutris operator BUMDes, 01/12/2019).

Kurangnya lahan parkir dan armada pengangkut sampah yang ada di desa Jati Kulon masih perlu untuk dikembangkan, apalagi saat pada

*weekend* para pengujungakan semakin ramai dan membuat kemacetan itu semakin bertambah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA PENELITIAN**

#### **A. Analisis Peran BUMDes Jati Kulon Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar didesa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional. Sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan

masyarakat di desa tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah merupakan sebuah instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa, perekonomian masyarakat desa, meningkatkan perputaran keuangan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum baik berupa penyedia berbagai barang dan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang telah ada di desa.

BUMDes Sumber Pangan Sejati merupakan sebuah organisasi ekonomi pedesaan berbasis pada perekonomian kreatif berlandaskan pada hukum dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. BUMDes Sumber Pangan Sejati tercatat dalam Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Kulon. Pendirian BUMDes Sumber Pangan Sejati ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan

potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya manusia serta potensi sumber daya alam yang ada pada masyarakat. Manfaat kegiatan BUMDes Suber Pangan Sejati dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu perangkat desa sebagai pengarah kegiatan, masyarakat sebagai pelaku sekaligus sebagai mitra pendampingan serta lembaga pemerintah serta non pemerintah sebagai pendukung kegiatan.

Kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati merupakan salah satu jenis pengembangan masyarakat dengan menggunakan model partisipasi masyarakat yaitu pengembangan masyarakat Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati

oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Secara langsung upaya ini ditujukan kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Disamping itu, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pengalamannya dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena kelompok masyarakat miskin sangat sulit memecahkan masalah yang

dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Wahjudin, 2016: 115).

Pada dasarnya pengembangan masyarakat adalah bentuk dari upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip berbasis lokal partisipasi pemberdayaan berpihak pada masyarakat demokrasi akuntabel (Perdes Jati Kulon, no 6 2017). Hal ini menjadi penting untuk mencegah timbulnya penciptaan BUMDes sebagai lembaga renter perdesaan, dan mencegah penguasaan oleh sekelompok tertentu terhadap aktivitas ekonomi perdesaan. Pendirian BUM Desa diutaakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Disamping itu, partisipasi yang berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan dan hasil kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016: 8).

Pemberdayaan harus dikedepankan dalam pembangunan BUMDes, yang menetapkan masyarakat sebagai kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan

yang disebut tujuan kolektif dalam pembangunan ekonomi. Pendirian dan pengembangan BUMDes yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat agar BUM Desa tersebut ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*). pemberdayaan dalam pendirian dan pengembangan BUMDes juga dimaksudkan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut, sehingga BUMDes menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan profesional melalui usaha masyarakat dan pemerintah desa dengan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan (Wahjudin 2016: 110).

Pemberdayaan masyarakat maksudnya adalah memperkuat masyarakat, dengan cara menggerakkan dan mendorong mereka agar dapat menggali potensi dirinya, dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya dengan cara melalui pembelajaran yang terus-menerus selama adanya pendamping atau fasilitator.

BUMDes Sumber Pangan Sehati merupakan sebuah wadah pemberdayaan masyarakat desa Jati Kulon untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada di desa juga mensejahterakan perekonomian masyarakat desa Jati Kulon.

Berkat adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes tersebut warga desa Jati Kulon mampu untuk mambantu keadaan masyarakat menuju lebih baik lagi. Dalam hal ini BUMDes sudah berhasil melakukan pemberdayaan sesuai dengan tujuan pemberdayaan pada BAB II yaitu merubah kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih mandiri lagi yang proses pemberdayaan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai tujuan.

Menuurut Sarlito Wirawan dalam soerjono (2002: 243) bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya di tentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan dari masing-masing sosial masyarakat yang berkaitan akan menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran (Soerjono, 2002: 243).

Dalam pelaksanaan BUMDes untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Konsep peran yang digunakan peneliti guna dalam pengalihan peran BUMDes Sumber Pangan Sejati adalah konsep peran yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Pasalnya peran BUMDes Sumber Pangan Sejati sangat berperan aktif seiring dengan perkembangannya tanpa disadari bahwa peran individu atau seseorang dalam menjalankan tugas dan wewenang berjalan sesuai dengan peraturan BUMDes Sumber pangan Sejati seperti yang disampaikan oleh bapak Sugeng Prasetyo pada bab sebelumnya bahwa peranan BUMDes Sumber Pangan sejati dibuktikan dengan banyaknya kegiatan masyarakat untuk berwirausaha (wawancara: bapak H, Masud, 01/12/2019). Berdasarkan data di lapangan teori peran pemberdayaan masyarakat oleh (Seyadi, 2003:16) maka peneliti dapat menganalisis peran yang dilakukan BUMDes Sumber Pangan Sejati terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa Jati Kulon.

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Gambar: 4.1 Anggota yang bekerja di BUMDes Jati  
Kulon



Sumber: Dokumentasi Observasi

Dari hasil wawancara dan observasi BUMDes memberi dampak positif terhadap perkembangan ekonomi desa Jati Kulon, karena BUMDes telah memberi kontribusi pada warga Jati Kulon yakni dengan dibukanya lapangan pekerjaan untuk warga Jati Kulon. Anggota yang bergabung dalam BUMDes sendiri terdiri dari masyarakat desa Jati Kulon.

Adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati yang ada di desa Jati Kulon juga berperan sebagai motivator masyarakat desa Jati Kulon untuk memanfaatkan masalah menjadi potensi lokal yang dimiliki desa Jati

Kulon sebagai sumber untuk meningkatkan ekonomi warga dan kemajuan desa Jati Kulon sendiri. BUMDes ini juga berdampak pada pendapatan warga desa Jati Kulon yang sangat membaik.

Sarana dan prasarana pendukung juga tidak kalah pentingnya demi suksesnya program BUMDes Sumber Pangan Sejati dalam pengelolaan sampah ini, mulai dari tempat sampah, gerobak sampah beserta operatornya juga tempat pembuangan sampah perlu kita fasilitasi demi lancarnya program ini. Ketersediaan alat pendukung juga perlu kita sediakan agar proses dalam pemanfaatan limbah lebih cepat teratasi.

Gambar: 4.2 gerobak sampah BUMDes Jati Kulon



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

BUMDes desa Jati Kulon berpedoman pada pengakuan terhadap hak asal-usul Desa, kebersamaan kerjasama yang selalu dilandasi dengan semangat untuk berperan aktif, saling menghargai dan saling menguntungkan diantara Desa dan unsur masyarakat Desa. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan dan untuk kepentingan bersama serta menjalankan usahanya dengan baik dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antar Desa melalui diskusi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat.

Perencanaan pembangunan desa Jati Kulon mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat desa Jati kulon dalam pengambilan keputusan, termasuk kelompok miskin dan rentan di antaranya anak-anak, perempuan, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Masyarakat desa Jati kulon juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa Jati Kulon.

- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Pangan Sejati untuk memberdayakan masyarakat desa Jati Kulon merupakan hal yang sangat tidak mudah. Ada beberapa tahapan untuk tercapainya sebuah pemberdayaan yang di lalui. Seperti memberikan penyadaran kepada masyarakat desa Jati Kulon tentang lingkungan dan potensi yang dimiliki desa, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk ikut serta bergabung dalam BUMDes dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gamabr: 4.3 Pemilihan sampah di gudang BUMDes Jati Kulon



Sumber: Dokumentasi Observasi

Keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Desa Jati kulon yang terletak

disekitar kawasan industri seringkali tercemari oleh limbah dari pabrik baik kertas, kaca, plastik, karet, besi, baja, tembaga, alumunium dan sampah rumah tangga. Belum lagi pada waktu musim penghujan sering kali masyarakat desa terkena penyakit Demam Bredara (DB), karena tidak ada pengelolaan terkait limbah yang ada di desa Jati Kulon.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

Gambar: 4.4 Pasar Desa Jati Kulon



Sumber: Dokumentasi Observasi

Menurut hasil wawancara dan observasi sapat dilihat pada gambar 4.4. Bahwa BUMDes Sumber Pangan Sejati juga berperan sebagai jaringan lembaga desa dalam pembangunan sektor wisata, pasar desa, pengolahan sampah secara tidak langsung BUMDes

Sumber Pangan Sejati telah mengangkat potensi yang dimiliki oleh desa Jati Kulon dan memperkenalkannya dalam kancah Propinsi bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang kategori Desa terbersih yang diberikan oleh P3MD dalam expo BUMDes 17 November 2019.

Gambar: 4.5 Kegiatan Expo BUMDes Sumber Pangan Sejati



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

Dalam hal ini BUMDes tidak bekerja sendiri melainkan menggandeng juga aparatur pemerintah desa, karang taruna, PKK, pokdarwis (kelompok sadar wisata) KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. BUM Desa Jati Kulon didirikan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu :

1. mengembangkan potensi perekonomian di kawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat Desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
  2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  3. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga;
  4. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;
  5. menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan dan jaminan sosial masyarakat;
  6. memperkuat kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes Sumber Pangan Sejati juga berperan sebagai fasilitator dalam mengeloa usaha-usaha didesa Jati Kulon untuk memfasiltasi dan memberdayakan usaha ekonomi yahg dikembanekan oleh masyarakat Desa, melidungi kepentingan umum, dan memfasilitasi

kegiata pelayanan publik Desa. BUMDes Sumber Pangan sejati sebagai lembaga ekonomi desa merupakan bagian penting dari proses pembangunan desa melalui penguatan ekonomi desa Jati Kulon. BUMDes Sumber Pangan Sejati pada dasarnya merupakan upaya konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-Lembasa ekonomi perdesaan. sebagai lembasa ekonomi milik desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Jati Kulon.

pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa Jati Kulon, meliputi:

- a) Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB Desa dengan memanfaatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b) Pengembangan kerjasama kemitraan strategis melalui :
  - 1) kerjasama antar desa
  - 2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa ;

- 3) kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial, ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor.
- c) Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa di wilayah Kecamatan Jati dengan pola kerjasama antar Desa melalui usaha bersama dengan cara penyertaan modal bersama Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- d) Melakukan diversifikasi usaha BUM Desa melalui Badan Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di wilayah Kecamatan Jati dengan membentuk Badan Hukum Unit Usaha Bersama BUM Desa, yang melakukan usaha dan/atau bisnis keuangan (financial business) melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dan usaha bersama (holding).
- e) Melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUM Desa secara profesional dan berkelanjutan (Perdes Jati Kulon no 6 tahun 2017).
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Partisipasi turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. kesetaraan dan keadilan gender: memberikan

ruang kepada wanita untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan serta kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. keberlanjutan: hasil dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tidak terbatas. transparansi dan akuntabilitas: pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pengambilan keputusan, dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat moral, teknis, legal, maupun administratif.

Menurut hasil wawancara dan observasi. masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi yang dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah.

Gambar: 4.6 studi banding dari Temanggung untuk peningkatan potensi lokal desa



Sumber: Dokumentasi Observasi

## **B. Hasil BUMDes Sumber Pangan Sejati Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil yang terjadi pada masyarakat merupakan akhir dari sebuah kegiatan yang dilakukakn oleh masyarakat tersebut. Yang merupakan hasil dari sebuah proses pelaksanaan panjang. Dan merupakan sebuah hasil akhir dari proses pelaksanaan pemberdayaan dimana masyarakat sangat berantusias terhadap pemberdayaan melalui peranan BUMDes Sumber Pangan Sejati desa jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Adanya pemberdayaan yang terselenggara diharapkan bisa memberikan hasil yang positif dan kesejahteraan bagi

masyarakat desa Jati Kulon. Hasil dari penyelenggaraan lebih berfokus pada kemandirian masyarakat dan masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mereka bisa mandiri. Desa Jati Kulon merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDes yang sangat maju dan mempunyai banyak usaha untuk memberdayakan masyarakat desa Jati Kulon serta mendapatkan pendapatan desa yang sangat tinggi. Sehingga mampu untuk memberdayakan masyarakat desa Jati Kulon.

Hasil dari sebuah pemberdayaan itu tidak hanya dilihat dari satu segi saja melainkan bisa dilihat dari segi ekonomi, sosial, lingkungan masyarakat desa Jati Kulon.

#### 1. Hasil Ekonomi

Sebelum adanya pemberdayaan oleh BUMDes Sumber Pangan Sejati pendapatan masyarakat desa Jati Kulon belum ada pengelolaan taekait dengan aset yang dimiliki desa, potensi yang ada di desa. Pekerjaan masyarakat yang sebagian bekerja petani dan serabutan yang pendapatannya tidak menentu, bahkan juga banyak yang tidak bekerja (pengangguran). Untuk keperluan rumah tangga sehari-hari seperti pangan, sandang, listrik, biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Dari data

perkembangan kependudukan terkait dengan ekonomi masyarakat desa Jati Kulon tercatat :

Tabel 3.8

Persentasi Kependudukan dengan ekonomi

No	Ankatan kerja penduduk usia 18-56 tahun	jumlah	Presentase %
1	Masih sekolah dan tidak bekerja	360	4
2	Menjadi ibu rumah tangga	250	3
3	Bekerja penuh	3.326	40
4	Bekerja tidak tentu	4.004	49
5	Cacat dan tidak bekerja	5	0,000608
6	Cacat dan bekerja	3	0,000365
7	pengangguran	277	3
	Total	8.225	100

*Sumber: Dokumen Perkembangan Desa Jati kulon 2016.*

Dari data diatas sebelum adanya BUMDes Suber Pangan Sejati masyarakat masih banyak yang bekerja dengan penghasilan tidak menentu, yang mencapai angka 49% dan pengangguran mencapai 3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian warga masyarakat masih

membutuhkan lowongan pekerjaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa Jati Kulon.

Tabel 3.9

## Persentasi Kependudukan dengan ekonomi

No	Ankatan kerja penduduk usia 18-56 tahun	jumlah	Presentase %
1	Masih sekolah dan tidak bekerja	347	4
2	Menjadi ibu rumah tangga	185	2
3	Bekerja penuh	3.609	45
4	Bekerja tidak tentu	3.804	46
5	Cacat dan tidak bekerja	2	0,000243
6	Cacat dan bekerja	6	0,00073
7	pengangguran	196	2
	Total	8.225	100

*Sumber: Dokumen Perkembangan Desa Jati kulon 2018*

Seiring dengan pendirian BUMDes Sumber Pangan Sejati masyarakat desa Jati Kulon mengalami peningkatan pendapatan dari penghasilan tidak menentu, yang mencapai angka 49% sebelum adanya BUMDes dan setelah adanya BUMDes sudah berkurang menjadi

46%, yang menjadi ibu rumah tangga dari 3% dengan adanya kegiatan BUMDes menjadi 2%, tingkat pengangguran yang dari data 3% sesudah adanya BUMDes seakarnng sudah berkurang menjadi 2%. Warga yang cacat dan tidak bekerja yang mulanya 5 orang sesudah adanya BUMDes menjadi 2 orang, dimana pekerjaannya menjadi tukang parkir di pasar desa.

Gambar: 4.7 Taman bunga Celosia dan pasar desa Jati Kulon



Sumber: Dokumentasi Observasi

Dari hasil wawancara dan observasi warga masyarakat desa Jati Kulon yang penghasilannya tidak lebih dari Rp 1.000.000,- per bulan Dengan adanya kegiatan Bank sampah, Pasar Desa, taman Bunga Celosia pendapatan masyarakat bisa mencapai kisaran Rp 1.200.00,- per bulan bahkan waktu liburan bisa lebih.

Adanya BUMDes Sumber pangan Sejati ini, dengan dukungan dan peran dari semua elemen masyarakat desa Jati Kulon serta partisipasi aktifnya masyarakat desa Jati Kulon. Dimana dengan adanya kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati masyarakat desa Jati Kulon dapat mengembangkan dirinya lebih mandiri, inovatif dan kreatif. Perkembangan BUMDes Jati Kulon ini juga menari dan memotivasi desa-desa lain untuk dijadikan referensi peningkatan ekonomi desa. Pengelolaannya yang baik mejadikan desa ini sering mendapat juara ditingkat kabupaten maupun propinsi diantaranya juara 3 tingkat propinsi lomba bersih dan sehat (LBS) tanggal 17 november dan juara 1 tingkat kabupaten lomba program yang diadakan pada tanggal 30 november 2019.

Gambar 4.8: lomba bersih dan sehat tingkat propinsi



Sumber: Dokumentasi Desa Jati Kulon

Dari pemerintah kabupaten memberikan anggaran dana untuk desa Jati kulon yang diberikan oleh Bapak H. Mustofa selaku Bupati Kudus sejumlah RP 416.475.500- untuk pengelolaan dan pengembangan BUMDes Sumber Pangan sejati dapat dilihat pada gambar 4.9.

Gambar: 4.9 pemberian anggaran dana dari pemerintah kabupaten Kudus



Sumber: Dokumentasi Observasi

“Alhamdulillah mas dengan adanya BUMDes membukakan lapangan pekerjaan untuk saya, saya bisa berjualan di pasar desa penghasilan saya dapat saya gunakan untuk tambahan uang belanja, bayar listrik, uang sekolah anak dan lain-lain mas. Selain itu, Pasar Desa ini juga dekat dengan Taman Bunga Celosia yang menjadi destinasi wisata di desa Jati Kulon ini mas. Waktu hari libur pendapatan saya bisa bertambah mas yang rata-rata perharinya Rp 100.000, waktu hari libur bisa mencapai Rp 200.00 bahkan lebih mas dan seringnya ada studi banding dari desa lain menjadi tambahan pendapatan saya mas” (wawancara: Ibu Eka, 03/12/2019).

Begitu pula yang dikatakan oleh Trisno tanggal 03/12/2019

“Pendapatan saya ada penambahan mas dengan adanya kegiatan pemilihan sampah yang ada di bank sampah, pasar desa. Dengan adanya kegiatan itu saya bisa menabung di bank sampah setiap bulannya mas pendatan tambahan saya rata-rata Rp 300.000 – Rp 600.000 mas. Lumayan untuk tambahan uang sekolah anak saya, selain itu untuk tambhan modal mas”.

lain pula dengan yang dipaparkan oleh mbak Ika tanggal 03/12/2019

“saya kerja di BUMDes ini juga baru mas, saya habis lulus SMA langsung di panggil untuk ikut bergabung disini, ya lumayanlah mbak, buat menambah pengalaman. Yang kerja di sini kan tidak ibu-ibu atau orang tua saja tetapi yang mau bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kan mereka mempunyai pendapatan sendiri”.

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan, bahwa masyarakat desa Jati Kulon setelah adanya pemberdayaan menjadi lebih baik mereka bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari pemberdayaan yang telah dirintis oleh BUMDes Sumber Pangan Sejati.

## 2. Segi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber maka dapat di analisis perubahan dari aspek sosial yang dirasakan meliputi perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, Meningkatkan gotong royong dalam pembangunan taman bunga celosia dan pasar desa. Saling berdiskusi dalam mencari inovasi pembuatan karya baru, semakin intensnya pertemuan-pertemuan warga disetiap RW dalam rangka memajukan kegiatannya. Selain itu gotong royong juga dilakukan dalam membersihkan sungai dan pembuatan resapan air desa.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Dimana masyarakat desa Jati Kulon yang setelah diadakannya pelatihan tentang pengelolaan sampah, masyarakat desa Jati Kulon bertambah pengetahuannya dan wawasannya untuk mengolah sampah yang dianggap

banyak orang tidak berguna. Dirubah dan diolah dengan keterampilan untuk dijadikan barang yang lebih bernilai ekonomi. Barang yang diolah diantaranya: pembuatan sepatu dari sepatu yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi, pembuatan tas dari bungkus kopi, pembuatan rantang aqua, pembuaran bunga dari plastik dan lain sebagainya.

Gambar 4.10 pembuatan kreasi dari sampah



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Dimana masyarakat desa Jati Kulon yang ber partisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan BUMDes Sumber Pangan Sejati seperti: membersihkan lingkungan desa Jati Kulon yang diikuti semua warga desa untuk kenyamanan desa yang dirasakan semua

masyarakat desa Jati Kulon. Bahkan menjadi destinasi wisata di desa Jati Kulon.

Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Dimana masyarakat yang menyetujui peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dimana masyarakat yang membuang sampah sebarang didenda Rp 10.000 untuk pengembangan BUMDes. Yang dimana deda yang diterapkan, untuk membuat warga desa Jati Kulon sadar akan kebersihan lingkungan.

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Wahjudin, 2016: 115). Pemerintah desa Jati Kulon menyadari bahwa keikutsertaan masyarakat desa Jati Kulon dalam membantu memberdayakan masyarakat adalah bersifat penting. Yang mana hal tersebut akan menjadi keberhasilan BUMDes dalam memberdayakan warga desa.

Dari hasil wawancara dan observasi Program-program dari BUMDes itu sendiri adalah Kampung

Padang Bulan. Dinamakan kampung padang bulan, karena wilayah itu disepanjang jalan terdapat berbagai jenis lampion. Jalannya juga diberi warna-warni, sehingga enak untuk jagong bareng. Selanjutnya setiap malam minggu mengadakan *car free night*, banyak pengunjung dari luar RT dan luar desa, mereka sambil menyantap makanan khas tempo dulu pada waktu terang bulan. Kampung Agro. Dinamakan Kampung Agro, karena wilayah tersebut, sudah tertata lapak-lapak penjual buah, hasil pertanian warga setempat, seperti Melon, Semangka, Tomat. Pembeli bisa membeli dengan memetik sendiri di sawah. Di sini juga sebagai Destinasi Wisata Bunga Celosia. Kampung Pintar, karena terdapat pusat pembelajaran yaitu perpustakaan desa, dengan nama “MELATI”. Perpustakaan Melati menyediakan berbagai macam buku, baik diakses melalui manual atau via online. potensi tentang proses pengoplosan serta daur ulang sampah serta kebersihan dan keindahan lingkungan.

Gamabar: 4.11 Kampong Padang Bulan



Sumber: Dokumentasi Observasi

“Kampong Pandang Bulan ini mas, sering kali dikunjungi oleh warga dari RT lain bahkan dari luar desa. Diwilayah sepanjang jalan ini terdapat berbagai jenis lampion mas, jalannya juga berwarna-warni enak buat foto-foto dan diskusi mas. Dulu sebelum ada pengelolaan daerah sini kotor, kumuh dan bau mas. Karena tempatnya dekat dengan sungai, tempatnya juga tidak sebagus ini mas. Tapi setelah di adakan pengelolaan tempat ini bersih dan nyaman mas, bahkan setiap malam minggu desa ini mengadakan *car free night*. Say juga berjualan makanan khas tempo dulu pada waktu terang bulan mas”. (wawancara dengan bapak Joko, 03/12/2019).

Hal itu juga dikatakan oleh Maryoto 28/11/2019 sebagai berikut

“Sering sekali mas desa ini mengadakan kegiatan BUMdes yang diikuti hampir semua warga desa mas. Apalgi kalo ada pelatihan

yang diadakan oleh kabupaten maupun propinsi warga sini ber antusias sekali untuk mengikuti kegiatan tersebut mas. Karena warga disini sudah merasakan hasilnya mas, sehingga mereka termotivasi untuk membuat karya-karya dari kegiatan BUMDes. Sehingga warga desa ini bisa menjual hasil karyanya di pasar, di ekspo seperti yang diadakan di alun-alun kodus, bahkan warga sini termasuk saya dapat menjualnya di via *online*”.

Seperti yang diungkapkan dengan Ibu Atik 01/12/2019 sebagai berikut:

“Hampir Setiap setiap bulan saya mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan mas. Dari BUMDes sediri sering mengadakan pelatihan yang bekerjasama dengan kabupaten dan propinsi mas. Pelatihan yang diadakan diantaranya adalah membuat tas dari bungkus kopi, mebuat boneka dari kain bekas yang sudah tidak terpakai, mendaur ulang sepatu yang sudah tidak terpakai, membuat tempat aqua, membuat figura. Setelah adanya pelatihan saya pratikan di rumah mas, saya membuat sendiri dan alhamdulillah saya jual laku mas. Bahkan bayak permintaan untuk pembuatanya seperti yang paling banyak sepatu dan tas mas. Harganya sekitar Rp 75.000- 300.000, saya juga menjualnya secara *online* mas. Lumayan mas untuk tambahan uang kuliah anak saya dan tambahan belanja”

Kemauan masyarakat yang tinggi ini haruslah ditarik lebih dalam agar mau dan bersedia dalam mengambil andil kegiatan program-program pemberdayaan. Sehingga kegiatan pemberdayaan itu nanti ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara signifikan.

### 3. Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang sangat identik dengan sebuah desa atas tempat tinggal seseorang. Jika suatu lingkungan desa itu bersih maka warga yang menempati juga akan terjaga kesehatannya. Akan tetapi beda lagi kalau dadri warganya sendiri yang tidak bisa hidup bersih jagankan ingin sehat, pasti penyakit juga akan menyerang mereka. Selain itu juga membuat desa akan terlihat kumuh dan kotor tidak terawat. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya, yaitu dari aspek intelektual (sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai pada aspek manajeriala (Wahyudin, 2016: 112) .

Berdasarkan musyawarah desa, warga mulai mengikuti program bersih desa. yang tujuannya adalah

untuk membangun desa agar tidak kumuh dan banyak sampah yang tersebar dimana-mana. Warga mulai sadar untuk membersihkan desanya agar terlihat indah juga agar tidak menjadi kumuh karena banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa Jati Kulon. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin berlimpah pula bertambahnya sampah di lingkungan. Persoalan sampah sudah menjadi kendala nasional di setiap permukiman. Hal ini yang menjadi tantangan bagi kami untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah. Berawal dari sini pula kami Pemerintah Desa Jati Kulon tergerak untuk mengelola sampah yang ada di seluruh wilayah Jati Kulon dengan program Bank Sampah. Program pengelolaan sampah adalah sarana bagi Pemerintah Desa Jati Kulon untuk mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Untuk mewujudkan impian tersebut dibutuhkan peran serta semua warga Jati Kulon. Peran serta dan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan desa yang bebas dari sampah dan memaksimalkan manfaat sampah.

Gambar 4.12 kegiatan bersih desa



Sumber: Dokumentasi BUMDes Jati Kulon

“Program pengelolaan sampah menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi bagi warga Jati Kulon. Semua warga harus berperan aktif dan mensukseskan program pengelolaan sampah ini dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab demi terwujudnya desa yang bersih dan sehat. Tujuan dari program pengelolaan sampah ini sudah menjadi tekad bulat bagi Pemerintah Desa Jati Kulon untuk mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Selain itu juga memanfaatkan dengan maksimal sampah yang ada menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga. pengelolaan sampah ini sudah terbukti efektif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, selain bisa menambah sumber pendapatan bagi setiap warga Jati Kulon, juga menyerap tenaga kerja untuk pengelolaan sampah”(wawancara bapak Sugeng Prasetyo selaku kepala desa Jati Kulon, 01/12/2019).

“Sebelum adanya BUMDes Sumber Pangan Sejati yang mengelola sampah, desa Jati Kulon sangat kumuh, sering banjir bahkan menjadi langganan. Tetapi mas skarang sudah

ada pengelolaannya warga juga berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya. Karena dari pihak BUMDes mensosialisasikan terkait dengan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Sekarang desa Jati kulon sudah tidak kumuh seperti dulu, penyakit DB pun sudah berkurang. Belum lagi keindahan lingkungan, yang diberi tema “Bunga Citra Lestari alias Kampung BCL”. Sebagai kampung BCL, mempunyai makna predikat citra kebersihan lingkungan dan taman. Selain penataan lingkungan yang bagus dan menarik, warga setempat juga akan membudidayakan tanaman obat-obatan yang langka untuk dikonsumsi sendiri dan bisa dijual belikan. Terwujudnya Desa Jati Kulon yang semakin bersih dan sehat, bebas dari sampah, dan bencana banjir” (wawancara dengan bapak Susilo Irianto selaku ketua pengawas BUMDes, 02/12/2019).

Gamabr 4.13 Halaman Gedung BUMDes untuk Penampungan sampah



Sumber: Dokumentasi Observasi

Dari gambar 4.13 hasil Wawancara dan observasi dijelaskan bahwa lingkungan desa Jati Kulon setelah

adanya tempat pengelolaan sampah yang didirikan BUMDes banyak perubahan. Desa tersebut menjadi desa yang bersih dan sehat. Jumlah penduduk 8.321 orang Jumlah penabung sampah : 80 orang Jumlah timbulan sampah : 3.328 kg/hari Pemilahan di Bank Sampah : 100 kg/hari Penyetoran di Bank Sampah : 150 kg/hari Pengomposan : 25 kg/hari Jumlah pengurangan sampah : 8,2 % perhari. Warga desa Jati Kulon bisa menikmati keindahan-keindahan yang dimiliki desa Jati Kulon itu sendiri. Selain itu warga desa Jati Kulon bisa menghirup kesehatan dengan lingkungan yang dimilikinya.

“Kalau lingkungan ya bersih iya mas, akan tetapi kita mempunyai kekurangan dalam hal tempat parkir buat wisatawan Taman Bunga Celosia yang ingin berkunjung di Jati Kulon, pengujung waktu hari libur juga tidak sedikit mas sampai operator bank sampah kuwalahan untuk pengambilan sampah. Apalagi armada yang ada masih di ayun mas belum berupa mesin. Armada seperti ini juga sedikit menghambat untuk pengambilan sampah, dengan armada ini pengambilan sampah lumayan lama mas. Harapan saya ditambah lagi armada yang bermesin mas, untuk pengambilan sampah biar lebih cepa<sup>t</sup>”(wawancara dengan bapak Sutris operator BUMDes, 01/12/2019).

Kurangnya lahan parkir dan armada pengangkut sampah yang ada di desa Jati Kulon masih perlu untuk dikembangkan, apalagi saat pada *weekend* para pengunjung semakin ramai dan membuat kemacetan itu semakin bertambah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneliti dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang peran BUMDes Sumber Pangan Sejati dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dilihat dari berjalannya program-program utama BUMDes Sumber Pangan Sejati. Peran BUMDes Sumber Pangan Sejati dalam meningkatkan perekonomian adalah berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya dan Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Disamping itu, BUMDes Sumber Pangan Sejati memiliki peranan lain adalah sebagai berikut. Pertama,

meningkatkan semangat wirausaha dalam aspek yang lebih luas. Kedua, meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam berwirausaha. Ketiga, ketergantungan masyarakat pada masyarakat lainnya mulai menghilang. Keempat, menghilangnya kebudayaan negatif pada masyarakat seperti membuang sampah sembarangan dan berperan dalam bidang kesehatan lingkungan.

Hasil yang telah dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Sumber Pangan Sejati adalah adanya BUMDes Sumber pangan Sejati ini, dengan dukungan dan peran dari semua elemen masyarakat desa Jati Kulon serta partisipasi aktifnya masyarakat desa Jati Kulon. Dimana dengan adanya kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati masyarakat desa Jati Kulon dapat mengembangkan dirinya lebih mandiri, inovatif dan kreatif. Dari segi sosial masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan adanya kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati, tidak hanya dari wilayah desa Jati Kulon bahkan dari desa maupun daerah lain. Dari segi lingkungan, setelah adanya tempat pengelolaan sampah yang didirikan BUMDes banyak perubahan. Desa tersebut menjadi desa yang bersih dan sehat.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Desa**

- a. Melakukan peningkatan kerjasama baik dengan perusahaan dan pengembang. Sebagai desa yang berada di tengah-tengah kota berkembang, desa harus bisa memanfaatkan hal ini untuk bisa melakukan kerjasama dengan para pengembang untuk bantuan dana CRS maupun kerjasama yang lain. CSR juga bisa dilakukan dalam bentuk tunai dan bentuk barang. Yang tentunya hal ini akan membantu pelak
- b. sanaan program BUMDes Sumber Pangan Sejati dan juga perlu diadakan pelatihan yang maksimal bagi para pelaksana BUMDes Sumber Pangan Sejati agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi. Dan tentu sangat membantu pelaksanaan BUMDes Sumbar Pangan Sejati.
- c. Dalam penancangan program Pemerintah Desa Jati Kulon sangat baik, alangkah lebih baiknya bila didukung dengan adanya hukum bagi masyarakat atau peraturan pada masyarakat berkenaan pola hidup bersih dan sehat.

2. Bagi pengelola BUMDes Sumber Pangan Sejati
  - a. Pelayanan atau customer servis pada masyarakat sudah baik dalam pelaksanaannya, alangkah lebih baiknya jika ditingkatkan sehingga maksimal dalam pelayanan masyarakat.
  - b. Pengelola BUMDes perlunya melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui program BUMDes yang dilaksanakan oleh BUMDes Sumber Pangan Sejati sehingga tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.
  - c. Peluang dan kelebihan dalam BUMDes Sumber Pangan Sejati harus dijadikan senjata dalam menanggulangi aspek kelemahan dan ancaman yang ada pada BUMDes Sumber Pangan Sejati.
3. Bagi masyarakat
  - a. Masyarakat diharapkan memiliki keterbukaan terhadap adanya program kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati.
  - b. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai program kegiatan BUMDes Sumber Pangan Sejati selama tidak bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku.

- c. Masyarakat diharapkan tidak berpuas diri pada bidang usaha yang dijalani, melainkan memotivasi masyarakat yang lainnya untuk aktif dalam kemandirian keluarga (perekonomian).

### **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kemudahan dan setelah kesulitan melainkan atas kehendak Allah SWT. sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah- mudahan skripsi ini memberi kemanfaatan bagi pembaca. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, dan semoga Allah senantiasa memberi rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal'amin



## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Cohen, Bruce J. 1992. *Struktur Sosial*. Jakarta: CIFOR.
- Ghozali, Dindin Abdullah. 2015. *Kader Desa Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haryanto, Eko Sri dkk. 2015. *Tanya Jawab Sekita Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora utama.

- Hud, Miftahul. 2009. *Pekerjaan Soaial Dan Kesejahtaraan Soaial : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Nyoman Shuida. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2012. *Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Jonatan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu hal 209
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media).
- Kasiyanto, M J. 1994. *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 2017. *Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubarab BUMDes*. Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Tahmidaten, Lilik. 2016. *Modul Mata Pelajaran Sosiologi Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mifta, Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Murdiyatomoko, Janu. 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nasdian, Ferdian Tonny. 20014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2016. *Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes)*.

Seyadi. 2003. *BUMDes Sebagai Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN

- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Gava Media.
- Sumpeno, Wahjudin dkk. 2016. *Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Winarno, Surahmad. 1994. *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Tehnik*. Bandung: Tarsito.

Wintoko, Bambang. 2009. *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Amri, Khairul. 2015. Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 13, Nomor 3.

Asrori, 2014. *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*. *Jurnal Bina Praja* | Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.

<http://kbbi.web.id/peran> di akses 14 Mei 2019

Katsir, Ibnu. 2013. *Tafsir Al-qur'an Al-adhimi*. Rekompiliasi Ebook Kampung Sunnah

Keputusan Kepala Desa Nita Nomor 04. 2017. *Tentang Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Nita*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7. 2007 Tentang Kader  
Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik  
Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman  
pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank  
sampah

Rosa, Maria. 2016. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  
Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada  
Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta*. MODUS Vol.28  
(2).

Supriyanto, dkk. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDesa) Terhadap Peningkatan Pendapatan  
Masyarakat Desa Studi kasus Pada Badan Usaha Milik  
Desa (BUMdes) di Desa Karang Dima Kecamatan  
Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Samawa Vol 14 No 1, April

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014  
tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014  
tentang desa.

## Lampiran 1

### Panduan Wawancara

#### A. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa Jati Kulon

1. Bagaimanakah peran aktif Pemerintah Desa Jati kulon dalam dalam pemberdayaan Masyarakat ?
2. Apa dasar hukum yang mendasari adanya BUM Desa ?
3. Apa sajakah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUM Desa ?
4. Apakah ada rencana kedepan untuk mengembangkan BUM Desa ?
5. Apa saja kewenangan kepala desa terkait dengan adanya BUM Desa ?
6. Bagaimanakah partisipasi masyaakat dengan adanya BUM Desa ?
7. Bagaimana akses, kualitas dan pemerataan pendidikan ?
8. Bagaimana peran BUM Desa dalam meningkatkan mutu pendidikan Khususnya di Desa Jati Kulon?
9. Bagaimana cara menggali dan memetakan potensi desa dan menetapkan sebagai usaha desa ?
10. Bagaimana cara mengembangkan kesadaran hak berpartisipasi dalam pembangunan desa ?

B. Pertanyaan untuk Pengelola BUM Desa Jati Kulon

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya BUM Desa Jati Kulon ?
2. Apakah yang melatar belakangi berdirinya Bum Desa Jati Kulon ?
3. Bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pendirian BUM Desa ?
4. Mekanisme legal / formal apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan pembentukan BUM Desa ?
5. Siapakah inisiator dari berdirinya BUM Dsa Jati Kulon ?
6. Bagaimanakah dinamika proses yang terjadi ketika BUM Desa Jati Kulon?
7. Bagaimanakah respon masyarakat Desa Petir ketika akan dibangun BUM DesaJati Kulon ?
8. Bagaimanakah visi dan misi dari BUM Desa Jati Kulon ?
9. Seperti apa struktur organisasi BUM Desa dan siapa yang bisa berperan dalam struktur organisasi BUM Desa?
10. Potensi apakah yang dikelola dan dikembangkan BUM Desa ?

11. Darimana saja modal untuk usaha BUM Desa didapat ?
12. Siapa sajakah yang menjadi anggota BUM Desa Jati Kulon ?
13. Apa sajakah bentuk-bentuk kegiatan yang ada di BUM Desa Jati Kulon ?
14. Bagaimana pendidikan dalam pengelolaan BUM Desa baik formal ataupun non formal ?
15. Bagaimana hasil produksi dan produk apa saja yang telah di hasilkan BUM Desa ?
16. Bagaimana Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi BUM Desa ?
17. Bagaimanakah upaya untuk melibatkan masyarakat Jati Kulon dalam mengembangkan BUM Desa ?
18. Apa saja yang menjadi penghambat pendirian BUM Desa ?
19. Apa saja hasil usaha BUM Desa dan apa yang harus dilakukan dengan sisa hasil usahanya ?
20. Apa yang membedakan BUM Desa dari jenis usaha lainnya ?

21. Bagaimana cara BUM Desa menarik investasi masuk desa ?

22. Bagaimanakah kondisi masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUM Desa?

C. Pertanyaan untuk Masyarakat Jati Kulon

1. Apakah dengan adanya BUM Desa Jati Kulon dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ?
2. Apakah dengan adanya BUM Desa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar ?
3. Pentingkah pendirian BUM Desa untuk kemajuan desa dan masyarakat ?
4. Bagaimanakah bentuk keterlibatan aktif masyarakat desa Jati Kulon dalam mengembangkan BUM Desa ?
5. Apakah fasilitas BUM Desa yang disediakan oleh pengelola sudah memadai bagi masyarakat ?
6. Apakah bahan bahan baku yang dikelola BUM Desa bersumber dari potensi lokal desa ?
7. Apakah dengan adanya BUM Desa sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan) ?

## Lampiran 2

### Dokumentasi dan Observasi



Gedung pertemuan BUMDes Suber Pangan Sejati desa Jati  
Kulon



Wawancara dengan Bapak Maryoto selaku operator BUMDes



Kejasama dan studi banding antar desa di gedung serba guna  
desa Jati Kulon



Gudang Bank Sampah BUMDes Jati Kulon



Survei kegiatan Bank Sampah BUMDes Jati Kulon



Taman Bunga Celosia desa Jati Kulon



Pasar Desa Jati Kulon



Wawancara dengan Ibu Vera kader pemberdayaan masyarakat  
desa Jati Kulon



Wawancara dengan Bapak Sulis tim survei Bank Sampah desa  
Jati Kulon



Wawancara dengan Bapak Sutisno pengepul sampah desa Jati  
Kulon





**Muhammad Marzuki**

**Kudus, 28 Juni 1998**

**Informasi Pribadi**

Alamat	Desa Klumpit Rt 04 / Rw 08, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Jenis Kelamin	Laki laki
Agama	Islam
Kontak Informasi	082313755221 (Telepon) <a href="mailto:Ukimarzukimm.28@gmail.com">Ukimarzukimm.28@gmail.com</a> (Email)

Marzuki\_mbsproperti\_28 (intagram)

Muhammad Marzuki (Facebook)

### **Latar Belakang Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal**

2002-2009

SMI Klumpit

2009-2012

MTs NU Matholi'ul Huda Bakalan  
Kryapyak Kudus

2012-2015

SMA NU Al-Ma'ruf Kudus

2015-

UIN Walisongo Semarang

#### **Pendidikan Non-formal**

2010

Patroli Keamanan Sekolah (PKS)  
Polres Kudus

2012

Pelatihan Kader Dasar (PKD) SMA  
Al-Ma'ruf

2015

Pendidikan Dasar Kader Koperasi

	(PDKK) 2015 Koperasi UIN Walisongo
2016	Pelatihan Kader (Dasar PKD) PMII Rayon Dakwah
2016	Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal oleh HMJ PMI UIN Walisongo
2017	Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut oleh HMJ UIN Walisongo
2018	Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Bidang Pengembangan Masyarakat oleh LPTP Surakarta
2018	Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
<b>Pengalaman Kerja</b>	
2016-2019	Staf Administrasi MBS Properti
2013	Pengawas lapangan Cv Mitra Jaya Kudus

<b>Pengalaman Organisasi</b>	
2010-2011	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTs Nu Matholi'ul Huda Bakalan Krapyak Kudus
2013-2014	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA NU Al-Ma'ruf Kudus
2015-2016	Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo
2016-2017	HMJ PMI UIN Walisongo
2015-2018	PMII Rayon Dakwah
2015-2017	Kordais
2015-2017	Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS)